

KEKUASAAN POLITIK DALAM AL QUR'AN MENURUT PEMIKIRAN HAMKA
(Studi Telaah QS. Al Baqarah/2:30, Ali Imran/3:26, An Nur/24:55, Shad/38:26)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH :

TOBOT LUBIS

NIM: 4415 1 001

PROGRAM STUDI

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Di bawah ini:

Nama : TOBOT LUBIS

NIM : 44.15.1.001

Jurusan : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

Tmpt/Tgl.Lahir : Hapung, 03 Maret 1994

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul **“KEKUASAAN POLITIK DALAM AL QUR’AN MENURUT PEMIKIRAN HAMKA (Studi Telaah QS. Al Baqarah/2: 30, Ali Imran/3: 26, AnNur/24: 55, Shad/38: 26)”** benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 01 Maret 2019

Yang membuat pernyataan

TOBOT LUBIS
NIM. 4415 1 001

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**KEKUASAAN POLITIK DALAM AL QUR'AN MENURUT PEMIKIRAN HAMKA
(Studi Telaah QS. Al Baqarah/2:30, Ali Imran/3:26, An Nur/24:55, Shad/38:26)**

Oleh:

TOBOT LUBIS

NIM.44151001

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 01 Maret 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP.19650705 199303 1 003

Dr. Zulkarnaen. M.Ag
NIP.19740111 200312 1 006

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Kekuasaan Politik Dalam Al Qur’an Menurut Pemikiran Hamka (Studi Telaah QS. Al Baqarah: 30, Ali Imran: 26, An Nur: 55, Shad: 26)**” an. TOBOT LUBIS NIM: 4415 1 001 Program Studi Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 13 Maret 2019.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Strata Satu (S.1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam.

Medan, 18 Maret 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

UIN Sumatera Utara Medan

Ketua

Sekretaris

Drs. Muhammad Aswin, M.Ap
NIP. 19680817 200312 1 003

Siti Ismahani, M.Hum
NIP. 19690503 199903 2 003

Anggota Penguji

A. Prof. Dr. Katimin, M. Ag
NIP.19650705 199303 1 003

2. Dr. Zulkarnaen, M.Ag
NIP.19740111 200312 1 006

3. Junaidi, M.Si
NIP.19810102 200912 1 009

4. Shalahuddin Ashani, M.Si
NIP.19820209 201101 1 008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

UIN Sumatera Utara Medan

Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP. 19650705 199303 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur ke-Khadirat Allah Swt., atas segala limpahan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEKUASAAN POLITIK DALAM AL QUR’AN MENURUT PEMIKIRAN HAMKA (Studi Telaah QS. Al Baqarah/2: 30, Ali Imran/3: 26, An Nur/24: 55, Shad/38: 26)”**. Kemudian Sholawat dan Salam kita kirimkan ke ruh baginda Alam Nabi Muhammad Saw., yang telah menerangkan kepada kita umatnya jalan yang di Ridhoi oleh Allah Swt., dan menjelaskan kepada kita mana jalan yang dimurkai oleh Allah Swt., sehingga terang bagi kita antara keduanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terutama Orangtua saya Insan Harahap. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan dan selaku pembimbing skripsi I penulis.
3. Bapak Dr. Zulkarnaen, M.Ag selaku dosen pembimbing II penulis.
4. Bapak Drs. Maraimbang, MA selaku wakil dekan III bidang kemahasiswaan.
5. Bapak Dr. Safria Andy. MA selaku pembimbing proposal skripsi penulis.
6. Bapak Drs. Muhammad Aswin, M.AP selaku ketua jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU Medan.

7. Bapak Drs. Abu Sahrin, M.Ag selaku dosen penasehat akademik penulis.
8. Bapak Junaidi, M.SI selaku dosen penguji penulis.
9. Bapak Shalahuddin Ashani selaku dosen penguji penulis.
10. Bapak Dr. Mhd. Sahminan, MA selaku dosen penulis.
11. Para Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing penulis selama menjadi Mahasiswa di Jurusan Pemikiran Politik Islam Fak. Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU Medan.
12. Kepada Ayah saya tercinta Alm. Maisjun Lubis yang telah mengasuh saya dengan rasa kasih sayang yang tiada terbatas.
13. Kepada Ibu tercinta Insan Harahap yang telah berjuang mengandung, menyusui, dan merawat saya hingga sampai saat sekarang ini, yang tiada terhingga kasih dan sayangnya kepada penulis
14. Kepada Abang saya tercinta Torkis Aminullah Lubis, yang menjadi sosok Abang sekaligus pengganti Ayah saya, yang telah mendukung dan memperjuangkan penulis sampai saat ini.
15. Kepada paman saya Hayuara Harahap, yang sangat besar jasanya kepada saya.
16. Kepada paman saya Pamusuk Hasibuan, S.IP yang sudah banyak membantu penulis baik moral maupun materi.
17. Kepada kawan-kawan satu kelas saya prodi Pemikiran Politik Islam stanbuk 2015:
Wildan Harahap, Ahmad Ropiki Tantawi, Sofyan Harun Siregar, Agus Riansyah, Mr. Syahidan Kanong, Hasan Basri, Mhd. Maulana Putra, Tukiran, M. Ari Padli, M.Arido Fahrur Rozi, Kaharuddin Yahya, Ardiansyah, Yuliarti Hutapea, Melisa

Sinaga, Juliana Sihotang, Desy Wahdiyana, Anggi Syukraini Putri, Narisa Husaini, Rina Mahdila, Devi Melati Sukma, Nur Chumairah, Elfa Soraya.

18. Kepada kawan-kawan alumni al Mukhlshin Sibuhuan tahun 2015 : Asroy Hasibuan, Afif Wira Handika, Yuyut Joni Andi, Rizky Wahyuni Lubis, Sofiyah Hayati, Annisa Pasaribu dan Fitriani Nainggolan yang telah bersama-sama berjuang dengan penulis dalam menempuh pendidikan sejak sekolah di al Mukhlshin hingga di perguruan tinggi.

Mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi sekalian pembaca terutama bagi diri saya sendiri. *Aamiin ya Robbal'aalamiin.*

Medan, 01 Maret 2019

TOBOT LUBIS
NIM.44151001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iv
Abstrak.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Istilah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : BIOGRAFI	15
A. Biografi Hamka	15
B. Kondisi Sosial Politik Hamka yang Mempengaruhi Pemikiran Politiknya	18
C. Karya-Karya Hamka.....	23
D. Tentang Tafsir Al Azhar.....	25
E. Corak Tafsir Al Azhar	28
BAB III: KEKUASAAN POLITIK, PEMIMPIN/KEPEMIMPINAN	33
A. Pengertian Kekuasaan Politik, Pemimpin/Kepemimpinan.....	33
B. Tujuan dan Tugas-Tugas Pemimpin Dalam Islam	38
C. Kriteria Pemimpin Dalam Islam.....	41

BAB IV: KEKUASAAN POLITIK DALAM AL QUR'AN.....	48
A. Landasan Kekuasaan Politik Dalam Al Qur'an.....	48
B. Penafsiran Ayat-Ayat Kekuasaan Politik Menurut Pemikiran Hamka	50
C. Urgensi Pemikiran Politik Hamka Terhadap Umat Islam Indonesia	66
BAB V: PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

ABSTRAK



Nama : Tobot Lubis
NIM : 4415 1 001
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi : Kekuasaan Politik Dalam al Qur'an Menurut Pemikiran
Hamka (Studi Telaah QS. Al Baqarah/2:30, Ali
Imran/3:26, An Nur/24:55, QS.Shad/38:26)

Hamka adalah seorang ulama dan penulis kelahiran Sumatera Barat. Sudah ratusan karya tulis yang dia hasilkan dan diterbitkan. Salah satu karya Hamka yang paling monumental adalah *Tafsir Al-Azhar*. Pemikiran-pemikiran Hamka banyak tertuang di dalam Tafsirnya, termasuk pemikirannya tentang politik.

Dalam penelitian ini, saya terfokus meneliti pemikiran Hamka tentang Kekuasaan Politik dalam al Qur'an dengan cara meneliti tafsiran Hamka terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kekuasaan politik yaitu QS. Al Baqarah/2:30, Ali Imran/3:26, An Nur/24:55, QS.Shad/38:26.

Penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa manusia adalah *Khalifah* Allah di muka bumi. Selanjutnya bahwa kekuasaan adalah berasal dari dan milik Allah Swt. Pengharapan yang dijanjikan oleh Allah kepada umat manusia yaitu bahwa Allah akan memberikan kemenangan berupa kekuasaan apabila mereka beriman dan beramal salih. Hamka menjelaskan bahwa pemimpin itu harus adil karena keadilan adalah sumber kekuasaan. Keadilan yang mutlak, yang tidak berat sebelah dan tidak terpengaruh oleh sentiment perasaan sayang dan benci.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Politik Islam dimulai sejak masa Rasulullah Saw., membentuk Negara Madinah. Praktik kenegaraan pada masa Nabi Muhammad Saw.,¹ Rasulullah Saw., menciptakan suatu tatanan sosial-politik di dalam sebuah Negara Madinah. Hal pertama yang dilakukan Nabi ialah membuat piagam Madinah pada tahun pertama Hijrah. Piagam yang berisi 47 pasal ini memuat peraturan dan hubungan antara berbagai komunitas dalam masyarakat Madinah yang majemuk. Di Negara baru ini Nabi Muhammad Saw., bertindak sebagai kepala Negara dengan piagam madinah sebagai konstitusinya.

Beberapa di antara isi Piagam Madinah tersebut, antara lain:

Dengan asma' Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah kitab (ketentuan tertulis) dari Muhammad, Nabi Saw., antara orang-orang mukmin dan muslim yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib dan yang mengikuti mereka, kemudian menggabungkan diri dengan mereka, dan berjuang bersama mereka.

1. *Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain.*
2. *Golongan Muhajirin dari Quraisy tetap mengikuti adat kebiasaan baik yang berlaku di kalangan mereka, mereka bersama-sama menerima dan membayar tebusan darah mereka, dan menebus tawanan mereka dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.*
3. *Banu'Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang beriman.*
4. *Banu al-Harits bin al-Khazraj tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah*

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group.2018), h. 35-50

mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang beriman.

5. *Banu Sa'idat tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang beriman....*²

Setelah Rasulullah Saw., wafat maka Umat Islam merasa kebingungan karena semasa hidup Rasulullah., Dia tidak pernah mengajarkan bagaimana cara memilih pemimpin yang akan menggantikan beliau. Maka pada saat itu para sahabat dari kalangan kaum Anshar dan Muhajirin mengadakan Musyawarah di sebuah tempat yang bernama *Tsaqifah* (balai pertemuan) Bani Saidah. Kemudian melalui proses yang panjang akhirnya Abu Bakar di angkat menjadi Khalifah (pemimpin) pengganti Rasulullah sebagai pemimpin Negara Madinah.³ Menjelang Abu Bakar meninggal maka Abu Bakar mewasiatkan kepada kepada kaum Muslimin tentang siapakah yang akan menggantikannya. Inilah wasiat Abu Bakar tersebut: *“Amma ba'du, sesungguhnya aku telah menunjuk untuk kalian Umar Ibnul Khattab sebagai khalifah pengganti, demi kebaikan kalian”*⁴

Kemudian para sahabat dan kaum muslimin menyetujui penunjukan tersebut dan jadilah Umar bin Khattab sebagai Khalifah kaum muslimin. Selanjutnya pengganti Umar Bin Khattab menjadi Khalifah adalah Utsman bin Affan melalui hasil pemilihan dewan musyawarah (formatur) yang di bentuk oleh Umar bin Khattab yang terdiri dari

² J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari pandangan Al qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994), h. 285-289

³ Hamka, *Sejarah Umat Islam: Pra-kenabian hingga Islam di Nusantara*, (Jakarta:Gema Insani.2016), h. 154-157

⁴ Katimin, *Politik Islam : Studi Tentang Azaz Pemikiran, dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam*, (Medan:Perdana Publishing.2017), h. 92

Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah Umar bin Khattab meninggal maka Tim formatur melaksanakan tugasnya dan terpilihlah Utsman bin Affan menjadi Khalifah kaum muslimin yang ketiga pasca Rasulullah Wafat. Ketika terjadi gejolak politik masa Utsman bin Affan yang berujung pada terbunuhnya Utsman bin Affan. Dalam keadaan seperti itulah Ali bin Abi Thalib di daulat menjadi Khalifah pengganti Utsman bin Affan.⁵ Khalifah yang empat itu lah yang dikenal sebagai *Khulafaur ar Rasyidun*.

Politik Islam selalu berpedoman kepada Al Qur'an dan Hadits sebagai landasan utama dan kepada pemerintahan Rasulullah di Madinah dan *al Khulafaur al Rasyidun* sebagai pelaksanaan politik dalam Islam. Al Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk bukan hanya untuk umat Islam sendiri melainkan kepada seluruh manusia dan sebagai pembeda antara *haq* dan *bathil* sebagaimana Firman Allah dalam al Qur'an.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

*"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)."*⁶

Dalam hal urusan politik, al Qur'an juga memberikan pedoman untuk dijalankan oleh Umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Tentunya ayat-ayat yang

⁵ Katimin, *Politik Islam : Studi Tentang Azaz Pemikiran, dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam*, h. 98-02

⁶Q.S. Al Baqarah.2:185

berkaitan dengan politik tersebut sifatnya masih umum dan membutuhkan penafsiran untuk mendapatkan prinsip-prinsip politik yang harus di jalankan oleh manusia.

Di Indonesia muncul seorang Ulama yang memberikan penafsiran terhadap al-Qur'an yang bernama Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka). Hamka memberi nama tafsirnya dengan tafsir *Al-Azhar*. Di dalam tafsirnya tersebut Hamka telah memberikan penjelasan tentang perihal kekuasaan politik dan bagaimana idealnya seorang pemimpin untuk memegang kekuasaan politik di suatu Negara.

Indonesia adalah sebuah Negara yang majemuk, memiliki masyarakat yang beragam baik budaya, suku, agama, bahasa dan lain-lain. Majemuk atau Pluralitas adalah suatu kenyataan yang dihadapi oleh umat manusia di muka bumi sebagai buah dari adanya globalisasi, termasuk di dalamnya agama.⁷

Dari keragaman itu akan menghasilkan pemikiran yang beragam pula di kalangan elit politik Indonesia. Hal ini nampak jelas pada kondisi politik Negara Indonesia pada awal abad kedua puluh satu ketika sebagian elit mencoba mengaktualkan pokok pikiran Piagam Jakarta.⁸ Menyikapi hal tersebut, Hamka mengemukakan gagasannya bahwa dalam kondisi apapun, segala sesuatu atau pun permasalahan yang ada dalam masyarakat harus di putuskan berdasarkan prinsip kemaslahatan umat, yakni apa yang dibutuhkan masyarakat dari semua lapisan itulah yang harus diambil sebagai keputusan.

⁷Katimin, *Politik Masyarakat Pluralis: Menuju Tatanan Masyarakat Berkeadilan dan Berperadaban*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis.2010), h. 198

⁸ Ahmad Hakim dan M.Thalhah, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka*, (Yogyakarta: UII Press. 2005), h. 1

Dalam keadaan demikian itu, seorang pemimpin memegang peran penting dalam memberikan kebaikan atau kemaslahatan dan keadilan bagi rakyatnya. Hamka menjelaskan 4 sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang datang menghampiri ketika sedang memimpin. Yaitu :

1. *Amanah*
Seorang pemimpin janganlah membelanjakan harta rakyat untuk kepentingan diri sendiri dan golongan.
2. *Berani*
Berani adalah sikap yang tenang dan tidak gugup, sehebat apapun pihak yang dihadapi. Dalam memilih suatu pendirian, kita tidak boleh takut akan dibenci orang lain.
3. *Bijaksana*
Hikmah kebijaksanaan adalah tiang yang kukuh bagi pertumbuhan pribadi. Timbulnya kebijaksanaan adalah karena ilmu, ketetapan hati dan karena meletakkan suatu pada tempatnya, serta memiliki sesuatu pada nilainya. Cara-cara untuk bijaksana adalah bersiap dan tidak terburu-buru, ilmu dan pengalaman, cerdik-cendikia, teguh dan tetap pendirian.
4. *Timbang Rasa*
Timbang rasa (Empati) muncul karena hati yang bersinar. Sinar itu membayang di mata sehingga raut muka pun menjadi jernih. Sir Walter Scott berkata, "Timbang rasa laksana rantai perak atau benang sutra yang menghubungkan hati dengan hati, akal dengan akal dan tubuh dengan jiwa"⁹

Sementara dalam hal untuk memilih pemimpin, Hamka menegaskan bahwa al Qur'an telah meninggalkan dua pokok dasar untuk memilih pemimpin atau pemegang puncak kekuasaan sebagaimana yang di kutib oleh Ahmad Hakim dan M.Thalhah. Yaitu:

Pertama, Ilmu, dan Kedua, Tubuh. Dan terutama adalah Ilmu yang berkenaan dengan tugas yang sedang dihadapinya, sehingga tidak ragu-ragu menjalankan roda kepemimpinan. Yang penting sekali ialah ilmu dalam cara mempergunakan tenaga. Pemimpin tertinggi itu tidak perlu tahu segala macam cabang ilmu, tetapi wajib mengetahui tentang apa yang akan ditugaskan untuk menghadapi suatu pekerjaan, itulah ilmu kepemimpinan. Sedangkan yang

⁹ Hamka, *Pribadi Hebat*, (Depok: Gema Insani.2017), h. 14-27

dimaksud dengan Tubuh ialah kesehatan, bentuk tampan, yang menimbulkan simpati. Oleh sebab itu, ulama-ulama banyak berpendapat bahwa seseorang yang badannya cacat (invalid) janganlah dijadikan seorang kepala Negara atau raja, kecuali cacat yang didapatnya di dalam peperangan karena bertempur dalam melakukan tugas.¹⁰

Dalam kasus kepemimpinan di Negeri ini (Indonesia), sejak Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang terdapat beberapa pemimpin yang disenangi rakyat dan ada juga yang tidak disenangi rakyat. Contohnya Soekarno, adalah pemimpin yang sangat di cintai rakyatnya dan Soeharto yang bertindak otoriter pada masa kepemimpinannya menjadikan masyarakat tidak suka dan melakukan perlawanan. Dalam konteks hari ini, masyarakat di hadapkan pada dua pilihan Presiden. Satu diantaranya adalah calon presiden pilihan Ulama dan satu diantaranya bukan pilihan Ulama tapi di dampingi oleh Ulama sehingga umat Islam seolah-olah terpecah menjadi dua golongan hanya karena perbedaan pilihan presiden. Dalam hal keadaan seperti itu seharusnya para elit politik dapat memberikan yang terbaik untuk rakyatnya terutama umat Islam yang jumlahnya mayoritas di negeri ini, tanpa harus di hadapkan pada dua pilihan yang kedua-duanya adalah seorang pilihan Ulama dan lawannya di dampingi Ulama. Sehingga prinsip yang di kemukakan oleh Hamka untuk mementingkan kepentingan rakyat dan memutuskan untuk kemashlahatan rakyat berubah menjadi kepentingan kelompok atau golongan tapi di balut dengan mengatakan untuk kepentingan Umat Islam. Kalau untuk kepentingan Umat Islam harusnya mereka elit politik Islam dapat bersatu dan mementingkan kepentingan umat Islam khususnya dan tanpa mengesampingkan kemaslahatan umat yang beragama selain Islam.

¹⁰ Ahmad Hakim dan M.Thalhah, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka*, h. 59-60

Selintas dari corak pemikiran Hamka tentang kekuasaan politik dalam *Tafsir Al-Azhar* yang merupakan fokus penelitian dalam pembahasan ini, terlihat bahwa beliau merupakan sosok atau figure yang teguh pendirian. Hasil karya beliau yang monumental, *Tafsir Al-Azhar* yang beliau tulis di masa situasi politik mengalami keadaan yang tidak stabil, serta pemikiran-pemikirannya yang berargumentasi pada dalil-dalil al Qur'an telah melahirkan daya tarik tersendiri untuk di teliti.

Penelitian tentang pemikiran Hamka yang tertuang dalam tafsir Al Azhar sudah dilakukan oleh beberapa orang di antaranya oleh Achmad Syahrul dalam skripsinya yang berjudul "*Penafsiran Hamka Tentang Syura Dalam Tafsir Al-Azhar*" Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. Di dalam Skripsi tersebut Achmad Syahrul menjelaskan tentang Syura Mulai zaman Nabi, zaman *al Khulafaur al Rasyidun*, dan sampai kepada zaman kontemporer. Dari kesimpulan yang di tarik oleh Achmad Syahrul, dia menyatakan.

Pertama. Syura termasuk bagian dari Dusturiyah¹¹, dimana Hamka mendasarkan konsep tersebut pada ayat 38 dari surah asy-Syura dan ayat 159 surat Ali Imran, yang menurut Hamka, Syura merupakan dasar pemerintahan dalam pembangunan masyarakat dan Negara Islam, walaupun dalam pemikirannya Hamka tidak menginginkan penyebutan Negara Islam.

Kedua. Sistem pemerintahan Negara Indonesia yang memiliki susunan lembaga Negara, dimana lembaga tinggi adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka DPR berwenang menetapkan UUD, GBHN. Secara normative, segala ketetapan yang telah diputuskan oleh DPR diambil dari beberapa anggota DPR yang bersifat multi-kontroversial dengan jalan musyawarah.¹²

¹¹ *Dusturiyah* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya, "Suatu dokumen yang menganut prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu Negara". Lihat Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam : Siyash Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2012), h. 19

¹² Achmad Syahrul, *Penafsiran Hamka Tentang Surya Dalam Tafsir Al-Azhar*, (Skripsi: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. 77-78

Penelitian kedua dilakukan oleh Sartiman Setiawan dalam skripsinya yang berjudul “*Penafsiran Hamka Tentang Politik Dalam Tafsir Al-Azhar*” jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008. Kesimpulan yang di ambil oleh Sartiman Setiawan dalam skripsinya meliputi :

1. Penafsiran Tentang Tema-tema Politik

Penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat yang berkaitan tentang tema-tema politik dalam skripsi Sartiman Setiawan terfokus pada 5 kajian, diantaranya: Syura, Negara dan Kepala Negara, Agama dan Kepala Negara, Hubungan Internasional dan Politik Bermoral Agama.

2. Moral Politik Agama

Moral politik agama yang dimaksud dalam skripsi Sartiman Setiawan adalah politik yang berlandaskan al Qur'an dan as-Sunnah, artinya moral politik agama yang sudah diajarkan oleh al Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

Penelitian ketiga tentang pemikiran Hamka, dilakukan oleh Ahmad Sirayudin dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep Etika Sosial Hamka (Dalam era Kekinian)*”. Jurusan Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Ahmad Sirayudin mengambil kesimpulan dari skripsinya tentang Konsep Etika Sosial dalam pemikiran Hamka, bahwa:

Pertama, Etika sosial adalah salah satu bagian etika teoritis yang mengandaikan bahwa setiap tindakan manusia selalu berdasarkan pada tindakan bersama. Hal ini berangkat dari suatu tesis bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial.

Kedua, Hamka menjelaskan konsep etika sosialnya berangkat dari struktur eksistensial manusia. Manusia dalam dirinya memiliki daya dan kekuatan-kekuatan tertentu yang kemudian mempengaruhi tingkah laku. Daya-daya itu

adalah; daya akal, daya marah, dan daya syahwat. Ketiga daya ini yang selalu mempengaruhi suasana manusia sehingga berdampak pula pada tindakannya. Namun begitu manusia juga memiliki kekuatan suara hati yang dapat menuntun manusia ke jalan yang benar bila manusia mengikuti bisikan-bisikannya.

Ketiga, Mengacu pada sumbangan dan relevansi konsep etika sosial Hamka dapat ditegaskan bahwa keberadaan corak etika seperti rumusan Hamka ini perlu ditetapkan dalam kehidupan hari ini. Mengingat bangsa Indonesia dikepung oleh kasus-kasus criminal dan ketidakadilan terhadap satu dengan yang lain. Maka etika sosial Hamka sesungguhnya berupaya untuk mencegah dan menjalankan tuntutan etika sosial yang sejalan dengan cita-cita sosial ajaran Islam. Etika pembebasan ini mendasari sumbernya pada tauhid, sehingga dengan begitu konsep etika sosial Hamka sangat kuat dan bercorak rasional-religius.¹³

Penelitian yang lebih spesifik terhadap pemikiran Hamka dalam kaitannya dengan kekuasaan politik di dalam al Qur'an masih sangat terbatas. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk meneliti kekuasaan politik dalam al Qur'an menurut pemikiran Hamka.

B. Rumusan Masalah

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana **Kekuasaan Politik Dalam al Qur'an Menurut Pemikiran Hamka (Studi Telaah QS. al Baqarah/2: 30, QS. ali Imran/3: 26, QS. an Nur/24:55 dan QS. Shaad/38: 26**. Masalah utama tersebut di rinci ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan kekuasaan politik dalam al Qur'an.
2. Bagaimana Tafsir ayat-ayat kekuasaan politik dalam al Qur'an menurut pemikiran Hamka.
3. Urgensi pemikiran politik Hamka terhadap Umat Islam Indonesia.

¹³Ahmad Sirayudin "*Konsep Etika Sosial Hamka : Dalam era Kekinian*,(Skripsi: Jurusan Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015), h.73-74

C. Batasan Istilah

1. Kekuasaan Politik: Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dan sebaliknya menolak pengaruh yang tidak di inginkan¹⁴. Politik adalah dapat dipahami sebagai suatu proses dan system penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan warga Negara dalam Negara (kota)¹⁵. Jadi kekuasaan Politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri. Yang memegang kekuasaan politik itu di sebut dengan Pemimpin.
2. Al qur'an adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah Swt., yang diturunkan kepada Rasulullah Saw., sebagai mukjizat. Al qur'an disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Swt., dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw., dan membacanya bernilai ibadah.

Jadi pembahasan Kekuasaan Politik dalam al Qur'an meliputi QS. al Baqarah/2:30, QS. ali Imran/3:26, QS. an Nur/24:55 dan QS. Shaad/38:26. Dalam hal ini di tujukan kepada kepala Kepala Negara/presiden.

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan kekuasaan politik dalam Al qur'an tafsir Al Azhar
2. Untuk mengetahui kekuasaan politik bermoralkan Al qur'an

¹⁴Wibowo, *Kepemimpinan: Pemahaman Dasar, Pandangan Konvensional, Gagasan Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo.2016), h. 28

¹⁵Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana.2015), h. 10

3. Dapat membedakan kekuasaan politik dalam Islam dengan kekuasaan politik konvensional yang cenderung sekuler.

E. Manfaat Penelitian

Menambah wawasan keilmuan tentang keluasan Al qur'an yang mengatur segala bentuk kehidupan manusia termasuk politik. Politik sangat menentukan terbentuknya peradaban manusia yang berkemajuan.

F. Metodologi Penelitian

Metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan Ilmiah atau ilmu. metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian *Deskriptif Kualitatif*. Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian pustaka. Salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan data adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

2. Data yang telah dihimpun

Data yang telah dihimpun meliputi kitab suci Al qur'an, karya-karya ilmiah atau buku-buku, yaitu:

1.1.Data pokok berupa ayat-ayat Al qur'an yang sesuai dengan tema pembahasan

1.2.Data pelengkap berupa buku-buku atau keterangan-keterangan yang diperlukan untuk menginterpretasi data pokok.

3. Sumber data

a. Sumber data Primer meliputi:

1. Tafsir Al Azhar Juz I-XXX. Prof. Hamka
2. Keadilan Sosial Dalam Islam. Prof. Hamka
3. Dari Hati ke Hati. Prof. Hamka
4. Pribadi Hebat. Prof. Hamka
5. Keadilan Sosial Dalam Islam. Prof. Hamka
6. Sejarah Umat Islam. Prof. Hamka
7. Buya Hamka: Sebuah Novel Biografi. Haidar Mustofa
8. Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka. Ahmad Hakim dan M.Thalhah.
9. Pribadi dan Martabat Buya Hamka. H. Rusydi Hamka

b. Sumber data Sekunder meliputi

1. Tafsir ayat-ayat politik . Prof. Saidurrahman.
2. Fiqih siyasah. Dr. Muhammad Iqbal.
3. Politik Islam: Studi tentang azaz, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam. Prof.Dr.H. Katimin, M.Ag.

4. Politik Islam di Indonesia: Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis dalam Sejarah Politik Nasional. Prof.Dr.H.Katimin,M.Ag.
5. Politik Masyarakat Pluralis: Menuju Tatahan Masyarakat Berkeadilan dan Berperadaban.Prof.Dr. Katimin, M.Ag.
6. Hadis-Hadis Politik. Prof.Dr.Katimin,M.Ag.
7. Terjemahan Ahkam Sulthaniyah. Al Mawardi.
8. Mukaddimah. Ibnu Khaldun.
9. Kepemimpinan Integratif dalam Konteks Good Governance. Eko Maulana Ali.
10. Dasar-Dasar Ilmu Politik: Miriam Bidoardjo.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh berkenaan dengan ayat-ayat kekuasaan politik kemudian di lihat tafsirnya pada tafsir Al Azhar karya Prof. Hamka, dianalisa sesuai dengan latar belakangnya. Dengan demikian penelitian ini terwujud deskriptip analitik.

5. Metode Penafsiran

Metode penafsiran Al qur'an yang di gunakan adalah metode penafsiran Maudlu'iy. Metode penafsiran Maudlu'iy adalah dimana mufassirnya berupaya menghimpun ayat-ayat Al qur'an dari berbagai surat yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang di tetapkan sebelumnya. Quraish Shihab menyimpulkan metode *maudlu'I* mempunyai dua pengertian, *Pertama*, penafsiran menyangkut satu surat dalam Al qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam

surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut. *Kedua*, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Al qur'an yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat Al qur'an dan yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutannya, menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan demi runtutnya penalaran dalam penulisan. Kajian dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: Pendahuluan, isi, dan penutup, yang selanjutnya di bagi kedalam beberapa bab dan sub bab.

Bab pertama berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang mengantarkan penulis untuk melakukan penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah, Batasan istilah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan metode penelitian.

Bab kedua berisi tentang biografi Hamka dan senting sosial-politiknya. Bab ini dimulai dengan mengulas biografi Hamka, meliputi sosio-historisnya, kondisi sosial-politik yang mempengaruhi pemikiran politiknya, karya-karya yang dihasilkan oleh Hamka.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan kekuasaan politik, pemimpin/kepemimpinan

Bab keempat berisi tentang ayat-ayat kekuasaan politik dalam al Qur'an dan penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat tersebut.

Bab kelima atau penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

¹⁶Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada.2014), h. 222-223

BAB II

BIOGRAFI

A. Biografi Hamka

Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah (lebih di kenal dengan HAMKA) lahir pada hari ahad 17 Februari 1908 M atau bertepatan dengan 1326 H. Tanggal itu sangat istimewa jika dikaitkan dengan meninggalnya kakek Hamka, Haji Amrullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Kisa-i, pada 2 Rabiul Awal 1325 H. Kelahiran Hamka itu tepat 9 bulan 10 hari dari wafatnya Haji Amrullah kakek Hamka. Hamka adalah anak tertua dari empat bersaudara, disamping beberapa saudara tiri yang lain. Hamka Lahir dari keluarga yang sederhana tapi memiliki status sosial yang tinggi di lingkungan masyarakat Minangkabau. Ayahnya bernama Abdul Karim bi Amrullah, atau biasa disebut Haji Rasul, adalah anak laki-laki yang berasal dari keturunan keluarga ulama. Juga dikenal sebagai pelopor gerakan pembaharuan Islam, yaitu gerakan Islah atau *tajdid* di Minangkabau. Ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Azakaria alias Gelanggar, yang juga seorang keturunan bangsawan. Hal itulah yang kemudian membuatnya memiliki kedudukan terhormat. Oleh orang-orang kampung, beliau diberi gelar Bagindo Nan Batuah.¹⁷

Saat Hamka berumur enam tahun, Haji Rasul mengajak keluarganya pindah ke Padangpanjang. Hal itu terpaksa dilakukan karena beliau mendapat amanah untuk mengajar agama Islam disana. Pada 1915 atau setelah Hamka berumur 7 tahun ayahnya Haji Rasul memasukkan Hamka ke Sekolah Desa (setingkat dengan Sekolah Dasar di-

¹⁷Haidar Musyafa, *Buya Hamka: Sebuah Novel Auto Biografi*, (Tangerang Selatan: Imania.2018), h. 23

masa sekarang), tujuannya adalah supaya Hamka dapat mempelajari ilmu-ilmu umum. Selanjutnya Haji Rasul mendaftarkan Hamka ke sebuah sekolah agama yang ada di Padangpanjang, yaitu Diniyah School, tujuannya adalah untuk dapat mendalami ilmu-ilmu agama. Otomatis Hamka harus belajar di dua sekolah sekaligus setiap harinya, pagi menjelang tengah hari masuk sekolah Desa, siangnya belajar di Diniyah School sampai hari menjelang senja, dan pada malam harinya Hamka biasa berkumpul di surau bersama anak-anak lain. Di sana, mereka belajar ilmu agama kepada Ayahanda Haji Rasul dan ulama-ulama lain yang ada di sana.¹⁸

Hamka hanya belajar pendidikan formal sampai kelas dua Sekolah Desa. Ketika usianya mencapai 10 tahun, Hamka memilih untuk belajar ilmu agama di sekolah yang didirikan ayahnya sepulang dari Mekah tahun 1906 yaitu sekolah Thawalib di Padangpanjang. Semenjak Hamka masuk sekolah Thawalib, Hamka mulai serius belajar bahasa Arab dan Agama Islam. Hamka dikenal sebagai anak yang haus akan ilmu pengetahuan. Selain belajar di Thawalib, Hamka juga aktif belajar di Surau dan Mesjid dari beberapa Ulama terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M. Surjopratno, dan Ki Bagus Hadikusumo. Tahun 1924, Hamka yang masih remaja sempat berkunjung ke Jawa. Di Jawa, ia banyak belajar ilmu pengetahuan kepada para pimpinan gerakan Islam Indonesia, yaitu Haji Oemar Said Tjokroaminoto, H. Fakhruddin dan kepada Rashid Sultan Masnur saudara iparnya sendiri.¹⁹

¹⁸ Haidar Musyafa, *Buya Hamka: Sebuah Novel Auto Biografi*,... h. 26-31

¹⁹ Hamka, *Dari Hati ke Hati*, (Jakarta: Gema Insani.2017), h. 257-258

Kemudian pada tahun 1927, dengan bekal ilmu agama yang dia peroleh dari para pimpinan gerakan Islam Indonesia tadi, Hamka merintis karir sebagai guru agama di Tebingtinggi Sumatera Utara. Dua tahun setelah itu Hamka pulang ke Padang dan mengabdikan sebagai guru agama juga. Di tahun yang sama sekitar 1930, Hamka mendirikan Sekolah Agama yang diberi nama "*Madrasah Muballighin*". Hamka banyak menguasai ilmu di luar ilmu agama, diantaranya Ilmu filsafat, ilmu politik, dan ilmu sosial. Semua ilmu itu dia pelajari secara Otodidak. Hamka pernah juga bejalar ilmu Jurnalistik semasa bekerja sebagai wartawan, editor, penulis dan penerbit pada awal tahun 1920-an. Ia pernah bekerja sebagai wartawan di berbagai surat kabar, diantaranya *Seuan Islam*, *Seruan Muhammadiyah*, *Pelita Andalas*, dan *Bintang Islam*.²⁰

Setelah Indonesia merdeka, pada 1372 H/1952 Hamka meninggalkan Medan menuju Jakarta. Di ibu kota Indonesia inilah Hamka menjabat sebagai anggota Majelis Konstituante. Pada 1379 H/1959 M, ia menerbitkan *Panji Masyarakat*. Selain itu, Hamka juga menjadi staff pengajar di berbagai Universitas. Selama 2 tahun 4 bulan, yaitu pada 1384-1386 H/1964-1966 M, Hamka harus melewati hidupnya di penjara karena berbeda pendapat dengan bung Karno soal Negara Pancasila.²¹

Selama di penjara tersebut. Hamka menyelesaikan suatu karya paling fenomenalnya yaitu *Tafsir Al-Azhar*. Tafsir Al-Azhar merupakan satu-satunya karya Ulama Melayu yang ditulis dengan khas dan mudah dipahami. Tafsir Al-Azhar merupakan karya Hamka yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat dan yang

²⁰ Hamka, *Dari Hati ke Hati*, h. 258

²¹ Ahmad Rofi' Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, (Bandung: Mizan. 2015), h. 245

melegenda hingga hari ini di bandingkan ratusan judul buku yang pernah ia tulis, mulai dari buku agama, sejarah dan kebudayaan, tasawuf, politik dan filsafat.²²

Bebas dari penjara, tokoh yang berkali-kali terpilih dalam kepengurusan pimpinan pusat Muhammadiyah ini selanjutnya mencurahkan perhatiannya pada dunia tulis menulis dan dakwah Islam. Ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada 26 Juli 1975 di Jakarta, Hamka terpilih menjadi ketua umumnya yang pertama. Dalam Munas MUI pada Jumada Al Tsaniyah 1400 H/Mei 1980 M, Hamka kembali terpilih sebagai ketua umum. Namun pada Kamis, 9 Rajab 1401 H/19 Mei 1981 M, ia meletakkan jabatannya setelah terjadi heboh soal fatwa tentang kehadiran Umat Islam dalam Perayaan Natal yang menyatakan umat muslim haram ikut merayakannya. Hamka memperoleh gelar doctor *Honoris Causa* dari Universitas Al Azhar Kairo, Mesir pada 1378 H/1958 M, dan Universiti Kebangsaan Malaysia pada 1394 H/1974 M. Hamka berpulang ke hadirat Allah Swt., di Jakarta pada Jum'at, 22 Ramadhan 1401 H/24 Juli 1981 M, dengan meninggalkan tidak kurang dari 113 karya tulis.²³

B. Kondisi Sosial Politik Hamka yang Mempengaruhi Pemikiran Politiknya

Hamka hidup dalam empat fase pemerintahan Indonesia, yaitu pemerintahan kolonialis, masa kemerdekaan, masa pemberontakan PKI dan pemerintahan orde baru. Selama kurun waktu tersebut banyak hal yang dialaminya, serta banyak pula peristiwa terjadi yang mempengaruhi sikap, pemikiran dan pandangan beliau tentang berbagai hal. Awal mula perjuangan dan aktivisme politik Hamka sejak ia terlibat menjadi

²² Hamka, *Dari Hati ke Hati*, h. 259

²³ Ahmad Rofi' Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, h. 245

anggota Sarekat Islam (SI). Semenjak berdiri pada 1911, SI adalah salah satu Organisasi sosial-politik terbesar di Indonesia dan selalu aktif dalam segala kegiatan aksi politik untuk menuntut kemerdekaan Indonesia.

Hamka berkenalan dengan SI terjadi semenjak ia melakukan perjalanan ke Yogyakarta pada tahun 1925. Yogyakarta merupakan pusat kegiatan Muhammadiyah dan SI, selama di Yogyakarta Hamka tinggal di rumah pamannya Amrullah Ja'afar yang merupakan adik Ayahnya. Amrullah Ja'far banyak menceritakan tentang perkumpulan, seperti Sarekat Priyayi, Muhammadiyah, Taman siswa, Sarekat Islam, Jamiatul Khair, dan Boedi Oetomo. Tujuan di dirikannya perkumpulan itu adalah untuk membebaskan Indonesia dari kekuasaan penjajahan Belanda.²⁴

Hamka berkesempatan masuk ke lingkungan Muhammadiyah dan SI. Ia ikut serta dalam berbagai kegiatan pelatihan dan diskusi yang diadakan Muhammadiyah dan SI. Ia juga berkenalan dan belajar dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan SI seperti Kiyai Bagoes Hadikusumo dan HOS Tjokroaminoto. Banyak belajar dan menyimak dari para tokoh Muhammadiyah dan SI membuat Hamka yang masih muda kian mantap di lingkungan Muhammadiyah sebagai arena dakwah dan di lingkungan SI sebagai tempat perjuangan Politiknya. Dalam catatan Federspiel, Hamka membaktikan diri di Sarekat Islam karena Hamka menilai bahwa SI merupakan kekuatan sosial-keagamaan Islam yang kuat untuk melawan penjajahan Belanda.²⁵

²⁴ Haidar Musyafa, *Buya Hamka: Sebuah Novel Auto Biografi*, h. 172-173

²⁵ Azyumardi Azra, "Perjuangan Politik dan Pendidikan Buya Hamka" diakses dari <https://www.panjimas.com/inspirasi/tokoh/2018/02/16/membedah-perjuangan-dan-sikap-politik-buya-hamka/> di akses pada 11/01/19 jam 19.51 WIB

Pada 11 Januari 1942, pasukan Jepang mendarat di pelabuhan Tarakan Kalimantan Timur. Pada keesokan harinya, pasukan Belanda yang bertugas menjaga keamanan wilayah penghasil minyak terbesar di Indonesia itu langsung menyerah tanpa Syarat. Begitu juga dengan daerah-daerah lainnya dapat di kuasai oleh tentara Jepang dengan mudah. Pada 8 Maret 1942 Letnan Jenderal Ter Pooten, Panglima tentara Hindia Belanda, dengan didampingi oleh Pejabat tinggi Militer Belanda menerima ajakan Letnan Jenderal Imamura untuk berunding di Kalijati. Awalnya perundingan berjalan dengan sangat alot. Setelah mendapat tekanan-tekanan dari Pemerintah Dai Nippon Jepang, akhirnya Govermen Hindia Belanda tunduk pada kemauan Dai Nippon. Hasil perundingan di Kalijati itu adalah kapitulasi tanpa syarat angkatan perang Hindia Belanda pada pasukan Militer Jepang. Dengan adanya hasil perjanjian itu, otomatis pemerintah Dai Nippon mengambil alih kekuasaan seluruh wilayah Hindia Belanda dari Govermen Hindia Belanda.²⁶

Kekalahan kolonial Belanda di tangan tentara Jepang mengubah haluan perjuangan politiknya. Sikapnya yang sangat anti-Belanda berubah semenjak Jepang berkuasa, Hamka lebih bersikap terbuka dan menyesuaikan diri kepada penguasaan Jepang. Sikapnya yang demikian itulah yang membuat beberapa kalangan menuduh Hamka sebagai ‘Kolaborator’ penguasaan Jepang. Hamka mendapat tuduhan dari kalangan revolusioner salah satunya Syahrir, tuduhan itu juga dialamatkan kepada Soekarno dan Hatta yang juga dituduh sebagai ‘kolaborator’. Akomodasi Hamka itu terlihat ketika ia bersedia memangku jabatan sebagai penasehat Jepang untuk hal ikhwal

²⁶ Haidar Musyafa, *Buya Hamka: Sebuah Novel Auto Biografi*, h. 414-420

Islam dan kaum Muslim. Bukan hanya sebagai penasehat Jepang, tapi Hamka juga menerima pengangkatannya menjadi anggota Sangi Kai Syu, semacam Dewan Perwakilan.²⁷ Hamka juga bersedia melakukan kerjasama dengan penguasa Jepang karena pada 9 September 1944 Perdana menteri Kasio-atas nama Pemerintah Dai Nippon, menyampaikan pengumuman Pemerintah Jepang berjanji akan membantu Indonesia meraih kemerdekaan. Inilah ‘realisme’ politik Hamka.²⁸

Setelah Indonesia merdeka, di sela-sela kesibukan Hamka bekerja di Kementerian Agama RI dan berkiprah di Perserikatan Muhammadiyah, Hamka ikut serta berkegiatan di dunia politik sebagai anggota Partai Masyumi. Saat Hamka di daulat menjadi salah satu anggota Dewan Konstituante dari Partai Masyumi mewakili daerah Jawa Tengah dan sekitarnya, otomatis kesibukan Hamka semakin bertambah banyak. Membuat kiprah Hamka di dunia politik semakin bertambah besar. Sejak ikut memperjuangkan tujuan-tujuan Masyumi itulah Hamka mulai menjalin hubungan dekat dengan tokoh-tokoh muda Indonesia yang mewakili pandangan jauh ke depan. Seperti Muhammad Natsir, Muhammad Isa Anshari, dan Mr. Muhammad Roem. Orang-orang itulah yang memiliki pengaruh besar, tidak hanya di Masyumi, tapi juga di dunia pergerakan dan perpolitikan Islam saat itu.²⁹

Di dunia politik, Hamka pernah menjadi anggota partai politik Sarekat Islam pada tahun 1925. Di tahun 1945, dia ikut menentang usaha kembalinya Belanda untuk

²⁷ Azyumardi Azra, “Perjuangan Politik dan Pendidikan Buya Hamka” diakses dari <https://www.panjimas.com/inspirasi/tokoh/2018/02/16/membedah-perjuangan-dan-sikap-politik-buya-hamka/> di akses pada 11/01/19 jam 19.51 WIB

²⁸ Haidar Musyafa, *Buya Hamka: Sebuah Novel Auto Biografi*, h. 435-436

²⁹ Haidar Musyafa, *Buya Hamka: Sebuah Novel Auto Biografi*, h. 553-554

menjajah Indonesia dengan pidatonya dan ikut serta melakukan gerilya di hutan daerah Medan. Dua tahun setelah itu, dia mendapat pengangkatan menjadi ketua Barisan Pertanahan Nasional Indonesia. Pada tahun 1955, inilah masa dimana pemikirannya seringkali bertentangan dengan pandangan politik masa itu. Diantaranya pada saat partai-partai politik beraliran Nasionalis dan Komunis menginginkan Pancasila dijadikan sebagai dasar Negara.³⁰

Sejarah Hamka yang lekat dengan politik dilatarbelakangi oleh kehidupan berorganisasi dan berpolitik Hamka dengan aktif di berbagai organisasi. Hamka terdaftar sebagai anggota Sarekat Islam bersama dengan pamannya Ja'far pada 1925 M ketika Hamka berada di Yogyakarta, dan menjabat ketua Barisan Pertahanan Nasional sekaligus anggota Konstituante dari partai Masyumi. Dorongan pandangan sejarah Hamka yang lekat dengan segi politik terutama terhadap permasalahan pemimpin dan kepemimpinan umat merupakan refleksi dari kedekatan dirinya dengan kegiatan berorganisasi di Muhammadiyah dan berpolitik di Masyumi. Sejarah dibentuk oleh pemimpin yang memiliki kepemimpinan dengan klasifikasi berdasarkan keturunan, kekuatan, kepandaian serta pemimpin lain mengakuinya sebagai pemimpin. Hamka memberikan pandangan bahwa pemimpin dan kepemimpinan dijanjikan Allah telah menjelaskan dengan terang bahwa perkara yang membentuk pimpinan ialah tiga yaitu Allah, rasul dan orang yang beriman.³¹

³⁰ Kusnadi, "Nuansa-Nuansa Sastra Dalam Tafsir Hamka", wardah: no. Xxix/ th. Xvi/ juni 2015, h. 2

³¹ Fabian Fadhly Jambak, *Filsafat Sejarah Hamka: Refleksi Islam Dalam Perjalanan Sejarah*, Jurnal Theologia, Vol 28 No 2 (2017), 255-272, h. 261

C. Karya-Karya Hamka

Hamka merupakan Ulama yang memiliki Ilmu pengetahuan yang luas, mulai dari Agama, Filsafat, Politik, Sejarah dan masih banyak lagi. Di antara karya-karya Hamka tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Khatibul Ummah, Jilid 1-3, 1928
2. Adat Minang Kabau dan Islam, 1929
3. Ringkasan Tarikh Umat Islam, 1929
4. Hikmah Isra' dan Mi'raj
5. Arkanul Islam, 1932
6. Laila Majnun, 1932
7. Tenggelamnya kapal Van Der Wijk, 1937
8. Di dalam lembah kehidupan, 1939
9. Merantau ke Deli, 1940
10. Terusir, 1940
11. Tuan Direktur, 1939
12. Dijemput mamaknya, 1939
13. Keadilan Ilahi, 1939
14. Pembela Islam (Tarikh Sayyidina Abu Bakar Shiddiq), 1929
15. Cemburu (Ghirah), 1949

Agama dan Falsafah

1. Tasawuf Modern, 1939
2. Falsafah Hidup, 1939
3. Lembaga Hidup, 1940
4. Lembaga Budi, 1940
5. Majalah Semangat Islam, 1943
6. Majalah Menara, 1946
7. Negara Islam, 1946
8. Islam dan Demokrasi, 1946
9. Revolusi Fikiran, 1946
10. Revolusi Agama, 1946
11. Merdeka, 1946
12. Di dalam lembah cita-cita, 1946
13. Sesudah naskah renville, 1947
14. Ayahku, 1950
15. Mandi cahaya di tanah Suci
16. Kenang-kenangan hidup, Jilid I-IV, 1908-1950
17. Sejarah Umat Islam, Jilid I-IV, 1939-1955
18. Pedoman Muballigh Islam, 1950
19. Pribadi, 1950

20. Agama dan Perempuan, 1939
21. Perkembangan Muhammadiyah dari abad ke abad, 1952
22. Muhammadiyah melalui tiga zaman, 1946
23. 1001 Soal-soal kehidupan, 1950
24. Pelajaran Agama Islam, 1956
25. Empat Bulan di Amerika, Jilid I-II, 1953
26. Pengaruh Ajaran Muhammad Abduh di Indonesia, 1958
27. Soal Jawab, 1960
28. Dari perbendaharaan Lama, 1963
29. Lembaga Hikmat, 1953
30. Islam dan kebatinan, 1972
31. Sayid Jamaluddin Al Afghani, 1963
32. Hak-hak manusia dipandang dari segi Islam, 1968
33. Keadilan Sosial dalam Islam, 1950
34. Fakta dan khayal Tuanku Rao, 1970
35. Dilembah cita-cita, 1952
36. Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam, 1970
37. Studi Islam, 1973
38. Sejarah Islam di Sumatera.
39. Do'a-do'a Rasulullah Saw, 1974
40. Bohong di Dunia, 1952
41. Kedudukan Perempuan dalam Islam, 1970
42. Pandangan hidup muslim
43. Mengembalikan Tasawuf ke Pangkalnya, 1973
44. Tasir Al-Azhar. Juz', I-XXX, 1959-1981³²

Penghargaan dan Karier Hamka

1. Mendapat Gelar Pahlawan Nasional dari Pemerintah Indonesia pada tahun 2011.
2. Menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, 1975-1981.
3. Mendapat Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia, 1974.
4. Menjabat sebagai Penasihat Muhammadiyah, 1959-1981.
5. Tercatat sebagai Anggota Dewan Konstituante, 1955-1957.
6. Mendapatkan Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar, Kairo, 1959
7. Mendapatkan gelar Profesor dari Universitas Musthopo, Jakarta, 1959.
8. Menjabat sebagai Pegawai Tinggi di Kementerian Agama Republik Indonesia, 1951-1960.
9. Menjabat sebagai Ketua Front Pertahanan Nasional, 1947-1949.
10. Menjabat Konsul Muhammadiyah Sumatera Timur, 1943-1947.³³

³² Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta: Mizan Publika.2018), h. 373-

D. Tentang Tafsir Al-Azhar

Dinamai Tafsir *Al-Azhar* didasarkan atas penamaan Masjid Agung Kebayoran Baru dengan “Masjid Agung Al-Azhar” oleh Syaikh Mahmoud Syaltout selaku Rektor Universitas Al-Azhar Mesir ketika beliau berkunjung ke Masjid Agung Kebayoran Baru. Beliau berkata “*Bahwa mulai hari ini, saya sebagai Syaikh (Rektor) dari Jami’ Al-Azhar memberikan bagi mesjid ini nama “Al-Azhar”, moga-moga dia menjadi Al-Azhar di Jakarta, sebagaimana adanya Al Azhar di Kairo*”.³⁴ Materi kuliah Subuh yang diberikan oleh Hamka di Mesjid Agung Al-Azhar, sejak tahun 1959. Pada waktu itu mesjid Agung belum beralih nama menjadi mesjid Al-Azhar akan di terbitkan di sebuah majalah yang bernama *Panji Masyarakat* Oleh Hamka bersama dengan KH. Fakhri Usman dan H.M. Yusuf Ahmad.

Hal yang menjadi motivasi Hamka ketika menulis Tafsir Al-Azhar adalah bangkitnya semangat para anak –anak muda Islam di Indonesia dan di berbagai daerah yang menggunakan bahasa Melayu untuk memahami kandungan al Qur’an kala itu, sementara mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mempelajari bahasa Arab. Banyak anak-anak muda Islam yang memiliki minat kuat untuk belajar agama Islam, untuk menangkal pengaruh dan rintangan dari dalam maupun dari luar. Semangat mereka untuk belajar agama sudah tumbuh, namun untuk memahaminya mereka tidak memiliki kitab rujukan. Inilah alasan pertama Hamka dalam menyusun tafsirnya.

³³ Haidar Musyafa, *Buya Hamka: Sebuah Novel Auto Biografi*, h. 825

³⁴ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid I (Jakarta: Panjimas.1988), h. 48

Kemudian alasan yang kedua adalah para pendakwah atau para Muballigh. Mereka mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan agama namun tidak terlalu faham dengan bahasa Arab dan tidak terlalu banyak pemahamannya tentang ilmu pengetahuan umum. Dalam keadaan seperti itu membuat mereka tidak terlalu leluasa ketika menyampaikan materi-materi ceramahnya. Padahal mereka mengemban kewajiban yang lebih besar jika dibandingkan dengan para penceramah-penceramah pendahulu mereka. Dahulu apabila seorang muballigh bisa menyampaikan materi ceramahnya kepada masyarakat di kampung yang pemahaman agamanya masih mengikuti para ulama dan tidak terlalu kritis terhadap apa yang disampaikan oleh para muballigh, sudah dianggap cukup dan memadai. Akan tetapi pada zaman sekarang ini, Para Muballigh berhadapan dengan masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan yang luas diiringi dengan berkurangnya buta-huruf. Mereka sudah bisa membantah keterangan yang disampaikan oleh para muballigh dengan ilmu pengetahuannya. Padahal para muballigh belum mampu sepenuhnya untuk memahami isi al Qur'an secara mendalam. Untuk itu, "Tafsir" ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi mereka ketika menyampaikan materi ceramahnya.³⁵

Sewaktu izin terbit majalah *Panji Masyarakat* di cabut, diringi dengan cacian dan fitnah-an yang di lontarkan oleh kelompok yang berpaham komunis terhadap aktivitas Hamka di Masjid Agung Al-Azhar terus meningkat. Beruntung Jenderal Sudirman (JS) dan Kolonel Mukhlas Rowi (KMR), berusaha menebitkan Majalah Gema Islam supaya setiap kuliah subuh yang diberikan Hamka yang pembahasannya

³⁵ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid I, h. 4

seputar tafsir al Qur'an dapat diterbitkan melalui majalah Gema Islam, penerbitan itu berjalan sampai pada Januari tahun 1964.

Pada tanggal 27 Januari 1964 bersamaan dengan tanggal 12 Ramadhan tahun 1383, ketika itu Hamka baru saja selesai memberikan materi dakwah kepada ibu-ibu yang jumlahnya kurang lebih 100 orang di mesjid Agung Al-Azhar, Hamka ditangkap atas perintah penguasa Orde Lama, selanjutnya di jebloskan ke rumah tahanan. Berstatus sebagai tahanan politik. Hamka ditempatkan di daerah puncak pada rumah peristirahatan. Yaitu Bunglao Herlin. Dirumah tahanan itulah Hamka berkesempatan untuk menulis Tafsirnya. Semenjak kondisi tubuhnya tidak membaik Hamka dibawa ke Rumah sakit Persahabatan Rawamangun di Jakarta. Pada saat berada di Rumah Sakit Hamka melanjutkan penafsiran al Qur'an-nya. Pasca berakhirnya Orde Lama dan mulainya Orde baru yang dipimpin oleh Soeharto dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah ditumpas maka pada keadaan seperti itulah Hamka mendapat kebebasan atas tuduhan yang di alamatkan kepadanya pada 21 Januari tahun 1966 silam. Setelah kembali bebas selama lebih kurang dua tahun lamanya berada dalam tahanan, dan selama dua bulan menjadi tahanan kota. Hamka kembali menggunakan hari-harinya untuk menulis dan memperbaiki Tafsirnya yang dia ditulis selama berada dalam tahanan.

Penerbit Pembimbing Masa yang dipimpin oleh H.Mahmud menyelesaikan penerbitan tafsir Al-Azhar dari Juz 1 sampai dengan Juz 4, merupakan pertama kalinya tafsir Al-Azhar diterbitkan secara berurutan. Selanjutnya Juz 5 sampai dengan Juz 14

oleh Yayasan Nurul Isma Jakarta dan Pustaka Penerbit Pustaka Islam menyelesaikan penerbitan sisanya yaitu dari Juz 14 sampai dengan selesai Juz 30.³⁶

E. Corak Tafsir Al Azhar

Setiap Tafsir al Qur'an tentunya memiliki corak dan haluan tersendiri dari pada penafsirnya. Oleh sebab itu, Tafsir Al-Azhar pun akan didapati corak dan haluan penafsirannya. Hamka sebagai penafsirnya sangat memelihara dengan baik hubungan antara *akal* dengan *naqal*. Hubungan antara *dirayah* dengan *riwayah*. Hamka tidak semata-mata mengutip pendapat para mufassir sebelumnya namun menggunakan juga pemikiran dan pengalaman dirinya sendiri. Tidak juga semata-mata menggunakan pemahaman akal sendiri dengan mengesampingkan apa yang di jelaskan oleh para mufassir pendahulunya. Hamka menjelaskan:

Suatu Tafsir yang hanya menuruti *riwayat* atau *naqal* dari orang yang terdahulu, berarti hanya suatu 'textbook thinking'. Sebaliknya kalau hanya mempergunakan akal sendiri, besar bahaya akan terpesona keluar dari garis tertentu yang digariskan agama melantur ke mana-mana, sehingga dengan tidak disadari boleh jadi menjauh dari maksud agama.³⁷

Dari keterangan tersebut, sebuah Tafsir akan membawa corak, haluan dan mazhab dari pandangan hidup orang yang menafsirkannya. Sehingga terkadang al Qur'an yang jelas dan terang sebagai sumber dari setiap aktivitas hidup kaum Muslimin, sudah dipersempit pemahamannya oleh orang yang menafsirkannya, karena diarahkan kepada haluan yang dianutnya. Contohnya tafsir *al Kasysyaf* yang dikarang oleh Jarullah az-Zamakhsyari terlihat begitu gigihnya dia mempertahankan Mazhab

³⁶ Dewi Murni, Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis, Jurnal Syahadah Vol. III, No. 2, Oktober 2015, h. 28-30

³⁷ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid I, h. 40

Mu'tazilah yang dia ikuti. Kemudian kalau kita lihat juga Tafsir *ar Raazi*. Akan dilihat betapa gigihnya dia mempertahankan mazhab Syafi'iyah sebagai Mazhab yang dia ikuti. Selanjutnya kalau kita lihat tafsir yang di karang sekitar seratus tahun yang lalu, seperti Tafsir *Ruhul Ma'ani* yang dikarang oleh al-Alusi yang berasal dari Ulama Baghdad. Kita akan lihat bagaimana beliau mempertahankan mazhab Hanafi padahal sebelumnya dia mengikuti mazhab Syafi'i. Walaupun ada bunyi ayat yang pemahamannya lebih condong kepada pemahaman Mazhab Syafi'i tetapi dia masih menguatkannya dengan Mazhab Hanafi yang dia ikuti.”³⁸

Dikarenakan “ Tafsir Al-Azhar” ini ditulis dalam kondisi sosial yang baru, di suatu Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim jika dibandingkan dengan penganut agama seperti Kristen, Budha, Hindu, dan penganut agama yang lainnya. Sementara mereka sangat menginginkan bimbingan agama dan ingin memahami kandungan isi al Qur'an, maka pertentangan-pertentangan antar mazhab tidak dimuat dalam tafsir Al-Azhar ini. Dan Hamka juga tidak *Ta'ashub* terhadap suatu mazhab, melainkan hanya mencoba semaksimal mungkin untuk mencari makna dari ayat al Qur'an, menjelaskan makna dari bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia dan memberi ruang kepada siapa saja yang ingin memahaminya.

Sementara mazhab yang ikuti oleh Hamka ialah Mazhab Salaf, yaitu mazhab Rasulullah dan para sahabat Rasul dan para Ulama yang mengikuti langkah Rasul. Dalam persoalan Ibadah dan Akidah, Hamka tidak mencoba mencari pemahaman baru dan tidak mempertanyakan lagi melainkan mengikuti apa adanya. Bukan berarti taqlid

³⁸ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid I.1988, h. 40

buta kepada Ulama terdahulu, melainkan melihat dalam mencari yang lebih dekat pada yang *haq* untuk diikuti, kemudian tidak mengikuti pemahaman yang menyimpang jauh. Meskipun penyimpangannya bukan disengaja dari orang yang memberikan pemahaman itu.

Salah satu tafsir yang menarik hati bagi Hamka dan jadikannya sebagai contoh adalah *Tafsir al manar* yang dikarang oleh Sayid Rasyid Ridha, yang didasarkan pada pemahaman Syaikh Muhammad Abduh yang merupakan gurunya. Tafsir al Manar ini, selain menjelaskan tentang ilmu yang berhubungan dengan keagamaan, sejarah, fiqih, Hadits dan sebagainya, juga mencoba menyesuaikan ayat-ayat tersebut dengan kondisi kemasyarakatan dan politik yang sedang berkembang pada saat tafsir tersebut disusun. Walaupun penulisan tafsir ini hanya sampai 12 Juz, tidak sampai setengah daripada al Qur'an, tapi tafsir ini bisa dijadikan sebagai rujukan ketika melanjutkan penyusunan tafsir "Al-Azhar" hingga tamat. Sebenarnya permasalahan politik dan kemasyarakatan dunia Islam yang dibahas dalam tafsir *al Manar* tersebut, pada saat sekarang ini telah mengalami perubahan, disebabkan terjadinya perubahan di dalam Negara-negara Islam, tetapi landasan penafsiran yang beliau tetapkan, masih sangat pantas untuk dijadikan rujukan.

Sesudah tafsir al Manar yang terkenal itu telah terdapat beberapa tafsir lain, misalnya Tafsir *al Qasimi*, *Tafsir al maraghi*, dan Tafsir yang ditulis oleh seorang wartawan yang penuh semangat Islam, yaitu Saiyid Quthub. Tafsirnya itu bernama *Fi Zhilalil Qur'an* (Di bawah lindungan Al Qur'an). "Tafsir" ini selesai ditafsirkan seluruhnya atau 30 Juz. Dalam pandangan Hamka, ini merupakan suatu Tafsir yang

sangat sesuai untuk zaman sekarang ini. Kendati demikian, dalam hal *riwayat*, tafsir ini belum dapat menandingi *al Manar*, namun dalam *dirayat* dia telah menyesuaikan fikiran dengan pemikiran masyarakat setelah perang Dunia ke-II, yang disebut dengan zaman *atom*. Dengan demikian “Tafsir” karangan Saiyid Quthub ini sangat banyak memberikan pengaruh terhadap pemikiran Hamka ketika menulis “Tafsir”nya.³⁹

Tentang menafsirkan al Qur’an, Hamka menyatakan bahwa tafsir yang paling utama dan yang pertama dari al Qur’an ialah Sunnah Nabi. Yaitu perkataan dan perbuatan Nabi dan *Taqrir* yaitu segala perbuatan para sahabatnya yang dilakukan di hadapan beliau dan Rasulullah tidak mencegahnya dan memperbolehkannya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Swt., dalam al Qur’an:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka ⁴⁰ dan supaya mereka memikirkan”⁴¹

Hamka menjelaskan tentang makna Zikir dalam tafsirnya sebagai berikut:

Zikir artinya peringatan atau ingatan atau ingat. Artinya adalah perbuatan Rasulullah yang kita namai Sunnah itu adalah beliau kerjakan dengan sadar, supaya Sunnah beliau menjadi keterangan dan penjelasan daripada al-Qur’an itu. Sehingga Aisyah seketika ditanya orang bagaimanakah akhlak Rasulullah Saw., itu? Isteri beliau itu menjawab: “Akhlaknya ialah al-Qur’an itu sendiri”⁴²

Oleh karena itu, Sunnah Nabi adalah penjelasan dari al Qur’an, sehingga tidak boleh seorang mufassir memberikan tafsiran terhadap al Qur’an yang berlawanan dengan

³⁹ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid I, 1998, h. 41

⁴⁰ Yakni: perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam Al Quran.

⁴¹ QS. an Nahl/16:44

⁴² Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid I .1988, h. 25

Sunnah. Bahkan Sunnah wajib mengamati tiap-tiap Tafsir yang ditafsirkan oleh mufassir. Sunnah-lah yang menjelaskan makna umum dari ayat al Qur'an.

Dari penjelasan tersebut, terlihatlah bahwa corak tafsir Al Azhar ini adalah corak *Tafsir Ra'yi* (pemikiran) dan *bi al Matsur* (riwayat) . Hal ini terlihat ungkapan Hamka bahwa dia tidak semata-mata mengutip pendapat para mufassir sebelumnya tapi menggunakan juga pemikiran dan pengalaman sendiri. Tidak juga semata-mata pemikiran sendiri. Hamka menerangkan:

Suatu Tafsir yang hanya menuruti riwayat atau naqal dari orang yang terdahulu, berarti hanya suatu 'textbook thinking'. Sebaliknya kalau hanya mempergunakan akal sendiri, besar bahanya akan terpesona keluar dari garis tertentu yang digariskan agama melantur ke mana-mana, sehingga dengan tidak disadari boleh jadi menjauh dari maksud agama.⁴³

⁴³ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid I, h. 40

BAB III

KEKUASAAN POLITIK, PEMIMPIN/KEPEMIMPINAN

A. Pengertian Kekuasaan Politik, Pemimpin/Kepemimpinan

Kekuasaan merupakan jabatan yang di-ingini oleh setiap manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia tidak mungkin dapat melangsungkan hidupnya dan melanggengkan eksistensinya, kecuali dalam system kemasyarakatan dan saling membantu di antara mereka dalam upaya memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Jika mereka telah hidup bermasyarakat, maka tuntutan hidup mendorong mereka untuk saling berinteraksi dan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Masing-masing anggota masyarakat membutuhkan apa yang dimiliki orang lain yang ia tidak miliki, dan begitu juga sebaliknya. Sebagaimana Ibnu Khaldun menjelaskan:

Kekuasaan ini, sebagaimana yang Anda lihat, kuasa merupakan jabatan terhormat yang diinginkan banyak orang. Hal ini tentulah membutuhkan kemampuan penguasa untuk membela dan mempertahankan diri. Tindakan agresif dan defensive ini tidak akan terwujud dengan baik kecuali dengan dukungan berbagai fanatisme.⁴⁴

Kekuasaan dapat berjalan dengan mantap jika disertai legitimasi.⁴⁵ Kekuasaan atau *Power* dapat di definisikan sebagai kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dan sebaliknya menolak pengaruh yang tidak diinginkan.⁴⁶ Politik bisa dipahami sebagai proses dan system penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan

⁴⁴ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Tjm.Masturi Ilham, (Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.2016),hal.329

⁴⁵ Jubai Situmorang, *Etika Politik*, (Bandung: Pustaka Setia.2016), h. 139

⁴⁶ Wibowo, *Kepemimpinan: Pemahaman Dasar, Pandangan Konvensional, Gagasan Kontemporer*, h. 28

dengan warga Negara dalam Negara (kota).⁴⁷ Jadi, kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Kekuasaan itu disamping untuk memperoleh ketataan dari warga masyarakat juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan aktivitas Negara di bidang administrative, legislative, dan yudikatif.⁴⁸ Islam memandang gagasan kepemimpinan dalam bentuk yang positif, sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bukan diinginkan secara pribadi, melainkan diperlukan oleh tatanan sosial. Al Qur'an (4:59, 22: 41) telah menggambarkan definisi dan makna kepemimpinan di dalam Islam.⁴⁹

Arti pemimpin sebagaimana yang dikemukakan oleh Kartini Kartono yang di kutip oleh Eko Maulana Ali adalah: *‘Seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan’*. Sedangkan kepemimpinan menurut Inu Kencana yang di kutip oleh Eko Maulana Ali adalah:

Secara etimologi berasal dari kata dasar sama yaitu pimpin (lead) berarti bimbing atau tuntun. Setelah ditambah awalan pe menjadi pemimpin (leader) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui berbagai proses dan bentuk dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Jika ditambah akhiran an menjadi pimpinan artinya orang yang mengepalai. Kemudian jika dilengkapi

⁴⁷ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, h. 10

⁴⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008), h. 17-19

⁴⁹ Muhammad A. Al-Buraey, *Islam: Landasasn Alternatif Administrasi Pembangunan*, Tjm. Achmad Nashir Budiman, (Jakarta: Rajawali. 1986), h. 375

dengan awalan ke menjadi kepemimpinan (leadership) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.⁵⁰

Sementara di dalam Islam, pemimpin disebut dengan istilah *Imam*, *Khalifah*, dan *Amirul Mukminin*.⁵¹ *Imam* adalah kekuasaan dan kepemimpinan. Pemimpin selalu dikaitkan dengan kewenangan, kekuasaan dan kebijakan yang dimilikinya sebagai bagian dari tugas dan kewajiban seorang pemimpin. Imam dapat juga dipahami sebagai kepala Negara.⁵²

Kata *Khalifah* mulai diperkenalkan sejak Abu Bakar diangkat menjadi kepala Negara menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin di Negara Madinah. Pada masa itu, penamaan Khalifah belum dipahami sebagai gelar atau nama yang bertujuan kepada jabatan politik. Setelah Usman berkuasa, ia diberi gelar *Khalifatullah* (wakil Allah). Orang yang pertama kali menggunakan gelar ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Zaid bin Tsabit. Penggunaan istilah ini dilakukan ketika Zaid menulis puisi untuk memuji Usman. Diduga dari kasus inilah muncul istilah Khalifah yang menunjukkan pada jabatan sebagai kepala pemerintahan.⁵³ Makna Khalifah di dalam al Qur'an, sebagaimana Prof. Katimin dkk, menyebutkan pemakaian khalifah terdapat pada dua ayat berikut ini.

⁵⁰ Eko Maulana Ali, *Kepemimpinan Integratif Dalam Konteks Good Governance*, (PT Multicerdas Publishing, 2013), h. 17

⁵¹ Katimin, *Politik Masyarakat Pluralis: Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Berperadaban*, h. 37

⁵² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, h. 193

⁵³ Katimin, *Politik Masyarakat Pluralis: Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Berperadaban*, h. 41-42

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

"Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan."

Dari kedua ayat di atas Katimin dkk, menjelaskan bahwa khalifah itu merupakan sebuah "power" atau kewenangan untuk mengelola alam semesta ini. Khalifah itu bukan sebuah sistem baku, bukan sebuah bentuk kepemimpinan yang tegas wajib diterapkan, tetapi *khilâfah* itu adalah sifat kepemimpinan. Yaitu mekanisme yang harus dijalani seorang pemimpin dalam menjaga dan memelihara alam semesta ini. Manusia mempunyai daya dan kemampuan yang sudah dijanjikan oleh Allah Swt.⁵⁴

⁵⁴ Katimin, et.al. *Hadis-Hadis Politik*, (Medan: Perdana Publishing.2018), h. 21-23

Amirul Mukminin. Gelar Amirul Mukminin ini untuk yang pertama kali-nya diberikan kepada Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Dalam kaitan ini sebagaimana di kutip oleh Prof Katimin, Ibnu Khaldun menjelaskan:

“Penyebab penamaan ini adalah bagian dari cirri khas kekhalifahan, dan itu diciptakan sejak masa para khalifah. Mereka telah menamakan para pemimpin delegasi dengan nama amir; yaitu wazan (bentuk kata) fa’il dari imarah. Para sahabatpun memanggil Sa’ad bin Abi Waqqas dengan Amirul Mukminin karena dia memimpin tentara Islam dalam perang al-Qadisiyyah. Mereka merupakan sebagian besar umat Islam pada saat itu. Hal itu bertepatan masanya ketika sebagian sahabat memanggil Umar r.a dengan Amirul Mukminin. Lantas orang-orang menganggapnya baik dan benar, dan memanggilnya dengan gelar tersebut. Dikatakan bahwa seorang kurir dengan berita kemenangan dari beberapa delegasi dan masuk ke Madinah menanyakan Umar, “mana Amirul Mukminin?” dan didengarkan oleh sahabat-sahabatnya, dan mereka menganggapnya baik, dan mengatakan, ‘Demi Allah kamu tepat sekali menyebutkan namanya’. Sungguh dia benar-benar Amirul Mukminin. Lantas mereka memanggilnya dengan gelar tersebut dan gelar tersebut menjadi gelar yang tersebar luas dalam pergaulan rakyat, serta diwarisi oleh khalifah-khalifah setelahnya.”⁵⁵

Penggunaan gelar-gelar tersebut di atas, meskipun latar belakang kemunculannya berbeda sesungguhnya mengacu kepada orang yang sama dan memiliki pemaknaan yang sama juga, dan ditujukan kepada setiap orang yang memegang jabatan tertentu.

Dari keterangan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian kekhalifahan dan kekuasaan. Bahwa karakter dasar kekuasaan cenderung memerintah masyarakat berdasarkan tujuan dan keinginan naluriah mereka. Sedangkan kekuasaan politik cenderung memerintah masyarakat berdasarkan pandangan akal-nya; yakni tentang bagaimana mendatangkan kebaikan-kebaikan dunia dan mencegah terjadinya

⁵⁵Katimin, *Politik Masyarakat Pluralis: Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Berperadaban*, h.

sesuatu yang mendatangkan keburukan. Sementara kekuasaan dari suatu kekhalifahan yang lebih mengarah cara memerintah rakyatnya berlandaskan syari'at, baik untuk kepentingan *Ukhrawi* ataupun kepentingan *Duniawi* yang akan kembali kepada Allah. Sebab di sisi Allah., segala aktivitas didunia, hanyalah sebagai alat untuk menuju kehidupan di akhirat.

B. Tujuan dan Tugas-Tugas Pemimpin Dalam Islam

Kepemimpinan dalam Islam memiliki kewajiban yang berat dan memiliki sejumlah kewajiban yang harus di tunaikan oleh seorang pemimpin. Pemimpin harus melindungi orang yang berada di dalam kepemimpinannya. Dalam melaksanakan kepemimpinannya, seorang pemimpin harus bekerjasama dengan para pejabat-pejabat yang berada dibawahnya bukan berlaku sewenang-wenang.⁵⁶ Prinsip bahwa setiap pemimpin adalah bertanggung jawab atas seluruh yang berada di bawah kepemimpinnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang artinya “...Setiap kalian adalah pemimpin dan (akan) diminta pertanggung-jawaban atas yang dipimpinnya...”. Prof. Katimin dkk⁵⁷, menjelaskan tentang Hadis ini. Mengharuskan kepada setiap pemimpin, baik pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam keluarga dan pemimpin dalam Negara harus bertanggungjawab atas segala yang dipimpinnya. Tidak hanya sekedar bertanggungjawab, tetapi para pemimpin harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengurus persoalan rakyatnya di segala bidang kehidupan. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan

⁵⁶ Muhammad A.Al-Buraey, *Islam: Landasasn Alternatif Administrasi Pembangunan*, Tjm. Achmad Nashir Budiman, h. 378

⁵⁷ Katimin, *et.al. Hadis-Hadis Politik*, h. 47-49

berkhianat mendapat ancaman dari Allah Swt., Rasulullah Saw., bersabda “*Tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga*” , sabdanya lagi “*“...Ketahuilah tidak ada peng-khianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan penguasa terhadap rakyatnya...”*”

Seluruh kekuasaan yang memiliki jabatan dalam Islam bermaksud untuk menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dia dituntut untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyat.⁵⁸ Mewujudkan tujuan Negara, baik itu tujuan jangka pendek, jangka menengah, ataupun tujuan jangka panjangnya. Seorang pemimpin berkewajiban untuk mengajak kepada setiap rakyatnya untuk menaati dan tunduk kepada hukum-hukum Allah dan melaksanakan hukum-hukum dan syari'at-syari'at-Nya dengan sebaik mungkin. Pemimpin memiliki kewajiban menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran.⁵⁹ Secara umum tugas utama seorang pemimpin adalah menjaga dan mengatur supaya organisasi dan elemen-elemennya mewujudkan cita-cita bersama dengan cara yang efektif dan benar.⁶⁰ Ibnu Taimiah memberikan dua tugas yang harus di jalankan oleh pemimpin yaitu menjaga Amanah dan menjaga Harta.⁶¹ Sementara tugas-tugas pemimpin menurut Al Mawardi secara umum ada sepuluh:

1. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahli bid'ah atau ahli Syubhat yang merusak citra agama, seorang *imam* (Khalifah) harus

⁵⁸ Ibnu Qayum A-Jauziyah, *Buku Pintar, Memutuskan Perkara*, Tjm.Muhammad Muchshon Anasy, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.1998), h. 418

⁵⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, h. 204

⁶⁰ Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: Rajawali.1985), h. 2

⁶¹ Ibnu Taimiah, *Berpolitik Dalam Bingkai Syari'at*, Tjm. Abdul Hafs Al-Faruq,(Sukoharjo:Al Qowam.2018), h. 11

- mampu menegakkan hujah di hadapannya, menerangkan kepadanya, dan memberinya sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku.
2. Memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan di antara dua pihak yang saling bertikai. Tujuannya adalah agar keadilan dapat ditegakkan secara merata sehingga orang zalim tidak berani bertindak sewenang-wenang dan orang teraniaya tidak semakin dibuang.
 3. Melindungi Negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
 4. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah Swt., tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
 5. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang Islam dan *mu'ahidi* (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh Islam).
 6. Memerangi para penantang Islam yang sebelumnya telah didakwahi hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahli dzimmah*.
 7. Mengambil harta *fa'I* (harta yang diperoleh pasukan Islam dengan jalan damai tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat, baik secara nash maupun ijtihad, tanpa disertai rasa takut dan terpaksa.
 8. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mal (kas Negara) tanpa berlebihan ataupun terlalu hemat, juga mengalokasikannya tepat waktu.
 9. Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan.
 10. Berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama.⁶²

Berdasarkan penjelasan tersebut, para pemimpin Islam hendaknya menyadari betapa besar tanggung-jawab yang ia pikul sebagai pemimpin. Dia bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan, keamanan dan ketentraman bagi seluruh rakyat yang

⁶²Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Tjm. Khalifaturrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press.2015), h. 33-34

ia pimpin. Kalau sekiranya semua itu tercapai maka kemakmuran di suatu Negeri akan tercapai dan rakyat akan bahagia.

C. Kriteria Pemimpin Dalam Islam

Pada masa Rasulullah Saw., hidup, Rasulullah tidak pernah mengajarkan bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana kriteria pemimpin dan bagaimana cara memilih pemimpin tersebut, sehingga setelah Rasulullah wafat kaum muslimin kebingungan siapa yang akan menggantikannya pada akhirnya Abu Bakar terpilih melalui musyawarah dan dengan pertimbangan bahwa Abu Bakar adalah orang yang dekat kepada Rasulullah, Abu Bakar pernah ditetapkan Rasulullah menjadi penggantinya dalam sholat (jadi imam shalat) ketika Rasulullah sakit.⁶³

Selanjutnya Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar menjadi penggantinya sebagai Khalifah dengan di tunjuk oleh Abu Bakar karena di anggap paling layak menggantikan beliau. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab melalui pemilihan yang dilakukan oleh tim Dewan Musyawarah bentukan Umar bin Khattab dan terpilih lah Utsman. Seterusnya khalifah yang ke Empat yaitu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang ke empat menggantikan Utsman bin Affan setelah di tunjuk oleh mayoritas kaum muslimin setelah Utsman terbunuh.

Setelah Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah dan kemudian di rebut oleh Muawiyah. Pada masa Bani Umayyah dan bani Abbasiyah walaupun sama-sama mengatakan pemimpinnya sebagai khalifah, akan tetapi pengertiannya sudah berbeda.

⁶³ Hamka, *Sejarah Umat Islam: Pra-kenabian hingga Islam di Nusantara*, h. 156

Pada masa *al Khulafaur al Rasyidun* khalifah itu di artikan sebagai pengganti Rasulullah, akan tetapi setekah masa Umayyah dan Abbasiyah pengertian Khalifah menjadi wakil Allah di muka bumi.

Berdasarkan peristiwa sejarah umat Islam tersebut yang penuh dengan liku-liku politik dan berbagai macam peristiwa tentang siapa yang berhak memegang kekuasaan sebagai pemimpin. Maka para ulama memberikan pandangan atau pemikiran mengenai pemimpin dalam Islam yang mengacu kepada peristiwa-peristiwa yang di jalankan oleh para khalifah (pemimpin). Maka dari itu ada beberapa pandangan tentang siapakah yang berhak menjadi khalifah (pemimpin) dalam Islam.

Persyaratan yang harus dimiliki kepala Negara, telah diterapkan oleh para Khalifah, terutama Al Khulafaur Ar-Rasyidun dan khalifah setelahnya. Syarat-syarat yang dimaksudkan pada hakikatnya mengandung dua unsur. *Pertama*, mengetahui secara mendalam ajaran Islam, yakni Islam sebagai akidah dan syariah, *Kedua*, mengenal kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu kepala Negara atau Imam harus memahami pola pikir dan pola hidup masyarakat yang dipimpinnya, sehingga perbedaan budaya yang terjadi merupakan bagian dari hakikat rakyat yang dibimbingnya.⁶⁴ Namun dibawah ini akan dijelaskan bagaimana pendapat para pemikir muslim tentang kriteria orang yang berhak menjadi khalifah atau pemimpin.

Pertama. Ibn Taimiah menjelaskan, sebagaimana di kutip oleh Dr. Mhd. Iqbal dan Amin Husein Nasution, menetapkan menetapkan *Amanah* (jujur) dan berwibawa atau kuat untuk setiap calon pemimpin (kepala Negara). Tanda-tanda seseorang

⁶⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, h. 206

memiliki sifat jujur bisa dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Swt., dia tidak mau menjual ayat-ayat al Qur'an hanya untuk kesenangan dunia dan untuk keperluan politiknya, dan juga sikap ketidak-takutannya kepada sesama manusia sepanjang ia dalam posisi yang benar.⁶⁵ Untuk terwujudnya kehidupan bernegara yang harmonis hendaklah mereka meng-amanahkan *amanah* kepada orang yang memiliki hak atas amanah itu, dan berlaku adil ketika memutuskan keputusan pada setiap sengketa diantara sesama masyarakat. Untuk menopang pendapatnya, Ibn Taimiyah mengutip ayat al Qur'an.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...*⁶⁶

Kedua. Al Ghazali sebagaimana di kutip oleh Sirojuddin Aliy menetapkan. Seseorang yang ingin menjadi Khalifah (pemimpin) harus memiliki enam sifat pembawaan Yaitu; 1) Laki-laki, 2) Dewasa atau sudah baligh, 3) Berfikiran sehat atau waras, 4) Berstatus merdeka, 4) Berasal dari suku Quraisy, 6) penglihatan dan Pendengaran sehat. Karena tidak mungkin orang yang tidak sehat pendengaran dan penglihatannya (tuli dan buta) dapat mengurus orang banyak, sedangkan untuk mengurus dirinya sendiri dia tidak mampu.⁶⁷

⁶⁵Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana. 2013), h. 35

⁶⁶ Q.S. an-Nisaa/4:58.

⁶⁷Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan*, (Depok: Rajagrafindo Persada.2018), h. 257-258

Ketiga. Muhammad Al-Mubarak menegaskan bahwa kriteria utama orang yang harus dipilih sebagai kepala Negara atau Imam adalah; 1) Orang yang memahami kebudayaan rakyatnya yang pluralistic, 2) Orang yang akidahnya kuat sehingga tidak mentolelir begitu saja berbagai kemajuan kebudayaan yang merusak akidah Islam dan ideology yang Islami di negaranya, 3) Kecakapan politik dan administrasi, 4) Akhlak yang mulia, 5) Beragama Islam, 6) Laki-laki, 7) Keturunan Quraisy.⁶⁸

Keempat. Menurut Ibn Khaldun. ada empat syarat yang harus di penuhi bagi setiap orang yang ingin menduduki jabatan ke khalifahan ini, yaitu: 1) memiliki ilmu pengetahuan 2) berkeadilan, 3) Berkompetensi atau memilki *skill*, 4) sehat jasmani dan rohani, yang akan mempengaruhi ketika mengambil keputusan, melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan kriteri *kelima*, yaitu memiliki garis keturunan dari suku Quraisy, tapi hal itu masih diperdebatkan.⁶⁹

Sementara di dalam Al Qur'an Allah menjelaskan beberapa kriteria yang dapat di ambil sebagai syarat untuk menjadi pemimpin, diantaranya:

Pertama. QS. Al-Anbiya/21: 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ

Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.

⁶⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, h. 207

⁶⁹ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Tjm.Masturi Ilham, h. 342

Secara Tekstual ayat ini memberikan keterangan bahwa kriteria pemimpin itu yang mampu memberikan kebaikan dalam kehidupan rakyat secara keseluruhan sesuai dengan syariah.

Kedua. QS.Shad/38:26

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.

Ayat di atas secara tekstual menjelaskan kriteria seorang pemimpin itu harus mampu memberikan keadilan kepada rakyatnya dan jangan mengikuti hawa nafsu.

Ketiga. Q.S As-Sajadah/32: 24

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar⁷⁰. dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.

Salah satu syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin ialah Kesabaran dan ketabahan dalam menegakkan kebenaran. Orang yang tidak sabar dan tidak tabah ketika menegakkan hukum atau kebenaran maka hasilnya tidak akan memuaskan, karena tidak sabar dan tidak tabah adalah perbuatan yang mengikuti hawa nafsu (syetan).

⁷⁰ yang dimaksud dengan sabar di sini ialah sabar dalam menegakkan kebenaran.

Keempat. QS. Yusuf/12:55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Dalam ayat tersebut di atas, menjelaskan bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang pandai menjaga dan berilmu pengetahuan. Dapat diartikan bahwa seorang pemimpin itu harus mampu menjaga amanah yang diemban kepada dirinya dan harus berilmu pengetahuan dalam menjalankan amanah itu.

Semua itu tercermin dari sikap dan perilaku para Nabi dan Rasul. Sikap dan perilaku tersebut menjadi sumber keteladanan kepemimpinan untuk setiap umat Islam. Keteladanan Nabi Saw., antara lain terlihat dalam sifat-sifat beliau, *Shiddiq*, *Amanah*, *Tabligh* dan *Fathanah*. Itulah karakter dan juga merupakan sifat kepemimpinan Nabi Saw., yaitu:

1. *Shiddiq*, artinya jujur, tulus.
2. *Amanah*, artinya dapat dipercaya.
3. *Tabligh*, artinya menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan.
4. *Fathanah*, artinya cerdas⁷¹.

Itulah beberapa kriteria menurut para pemikir muslim yang harus di penuhi oleh setiap orang yang ingin menjadi pemimpin. Sementara soal bagaimana tara cara pemilihan/pengangkatan pemimpin tergantung kepada prinsip yang dipegang oleh suatu negeri. Karena pada dasarnya al Qur'an maupun Hadits tidak menyebutkan bagaimana tata caranya. Itu menunjukkan bahwa setiap negeri diperbolehkan

⁷¹ Eko Maulana Ali, *Kepemimpinana Integratif Dalam Konteks Good Governance*, h. 133

mengangkat pemimpin mereka sesuai dengan prinsip mereka dan tentunya tidak melanggar hukum-hukum yang di gariskan di dalam al Qur'an dan Hadits.

Soal status kewajiban mengangkat pemimpin. Al Mawardi menjelaskan, bahwa para Ulama terbagi kepada dua pendapat,. *Pertama*, status wajibnya pengangkatan pemimpin berdasarkan *akal* karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang pemimpin yang akan mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik dan permusuhan. *Kedua*, status wajibnya pengangkatan pemimpin adalah berdasarkan *syari'at*. Karena seorang imam memiliki kewajiban mengurus urusan-urusan agama walaupun akal tidak menganggap bahwa pengangkatan pemimpin itu bukan merupakan sebuah Ibadah.⁷²

⁷²Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Tjm. Khalifaturrahman Fath dan Fathurrahman, h. 9-10

BAB IV

KEKUASAAN POLITIK DALAM AL QUR'AN

A. Landasan Kekuasaan Politik Dalam al Qur'an

1. Kedudukan Manusia di Muka Bumi

Allah Swt., berfirman dalam al Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu

orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,

padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak

*kamu ketahui."*⁷³

2. Sumber Kekuasaan Politik

Allah Swt., berfirman dalam al Qur'an, QS. Ali Imran/3:26

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

⁷³ QS. Al Baqarah/2: 30

Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."⁷⁴

3. Janji Allah Kepada Orang-orang Yang Beriman dan Beramal Saleh

Firman Allah Swt. dalam al Qur'an, yang berbunyi:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
 مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan

⁷⁴ QS. Ali Imran/3:26

*tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.*⁷⁵

4. Pemimpin Harus Adil

Allah berfirman dalam al Qur'an, QS. Shad/38: 26.

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَظْلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

*Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.*⁷⁶

B. Penafsiran Ayat-ayat Kekuasaan Politik Menurut Pemikiran Hamka

1. Kedudukan Manusia di Muka Bumi

Dalam al Qur'an surah az-Zariyat/51:56 menjelaskan bahwa penciptaan manusia dan jin hanyalah untuk beribadah kepada Allah Swt. Manusia mempunyai kedudukan lebih mulia dibandingkan dengan jin, manusia diangkat menjadi Khalifah (wakil) Allah di permukaan bumi. Yang memiliki tugas sebagai wakil Allah tidak hanya di tanggung oleh para Nabi dan Rasul, karena para Nabi dan Rasul memang

⁷⁵ QS. An Nuur/24:55

⁷⁶ QS. Shad/38: 26

diutus untuk menuntun umat manusia, bukan juga di tanggung oleh para Raja atau presiden, para gubernur atau pejabat tinggi yang terpilih untuk mengelola persoalan negaranya. Tapi ini merupakan misi yang diamanahkan untuk semua umat manusia. Setiap manusia memiliki tanggung jawab bagi orang-orang yang berada dalam tanggungannya (rakyatnya)..⁷⁷ Sebagaimana hadits Nabi yang dikutip oleh Hamka “...*Semua kamu adalah pemimpin dan semua kamu bertanggung jawab atas kepemimpinannya...*”.⁷⁸

Dalam al Qur'an surah al Baqarah ayat 30, menjelaskan bahwa Allah menyatakan maksud-Nya kepada malaikat-Nya bahwa Dia hendak melantik khalifah-Nya di atas bumi. Karena itu, diciptakan-Nya Adam sebagai manusia pertama yang akan dijadikan khalifah. Khalifah adalah orang yang disertai tanggung jawab untuk melanjutkan kehendak orang yang mengkhalifahkannya.⁷⁹

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:

*"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."*⁸⁰.

Dengan dua ayat berturut-turut; yaitu QS.2:28 dan QS.2: 29 perhatian kita ini didasarkan oleh Tuhan. Sebagaimana Hamka Menjelaskan.

⁷⁷ Muhammad A. Al-Buraey, *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, trjm. Achmad Nashir Budiman, h. 115

⁷⁸ Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Cet.III; Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), Juz. II, h. 484

⁷⁹ Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Depok: Gema Insani. 2015), h. 17

⁸⁰ QS. Al Baqarah/2: 30

Pertama, bagaimana kamu akan kufur kepada Allah, padahal dari mati kamu Dia hidupkan, Kemudian Dia matikan, setelah itu akan dihidupkanNya kembali untuk memperhitungkan amal. *Kedua*, Bagaimana kamu akan kufur kepada Allah, padahal seluruh isi bumi telah disediakan untuk kamu. Lebih dahulu persediaan untuk menerima kedatanganmu di bumi telah disiapkan, bahkan dari amar perintah kepada ketujuh langit sendiri. Kalau demikian adanya, fikirkanlah siapa engkau ini. Buat apa kamu diciptakan.⁸¹

Kemudian Allah Swt., berfirman kepada para malaikat-Nya. “*Dan (Ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang Khalifah.*” (Pangkal ayat 30).

Di dalam ayat itu, Allah berfirman kepada malaikat bahwa Dia akan menciptakan Khalifah di muka bumi. “*Mereka berkata; Apakah engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau? Dia berkata; Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui!*” (ujung ayat 30).

Artinya setelah Allah menjelaskan maksud-Nya tersebut, kemudian Malaikat-pun memohon penjelasan, Khalifah mana lagi yang Allah kehendaki untuk dijadikan? Pertanyaan tersebut di jawab oleh Tuhan: “*Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*”. Setelah itu Allah pun melanjutkan apa yang telah Dia kehendaki, yaitu menciptakan khalifah tersebut; dia-lah Nabi Adam.

Untuk mendapatkan arti yang tepat terhadap kalimat *Khalifah* tersebut, perlu di kaji apa tugas Khalifah tersebut. Hamka menjelaskan:

⁸¹ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz I.1998, h. 161

1. Seketika Rasulullah Saw., telah wafat, sahabat-sahabat Rasulullah Saw., sependapat mesti ada yang menggantikan beliau mengatur masyarakat, mengepalai mereka, yang akan menjalankan hukum, membela yang lemah, menentukan perang atau damai dan memimpin mereka semuanya. Sebab dengan wafatnya Rasulullah, kosonglah jabatan pemimpin itu. Maka sepakatlah mereka mengangkat Sayyidina Abu Bakar as-Shiddiq ra. menjadi pemimpin mereka. Dan mereka gelar dia “*Khalifah Rasulullah*”. Meskipun yang dia gantikan memerintah itu utusan Allah, namun dia tidaklah langsung menjadi Nabi atau Rasul pula. Sebab risalat itu tidaklah dapat digantikan. Jadi, di sini dapat kita artikan “*Khalifah*” itu pengganti Rasulullah dalam urusan pemerintah.
2. Kepada Nabi Daud, Allah pernah berfirman:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

“*Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi*”⁸²

Ini bisa diartikan sebagai khalifah Allah sendiri; pengganti atau alat dari Allah buat melaksanakan Hukum Tuhan dalam pemerintahannya. Dan boleh juga diartikan bahwa dia telah ditakdirkan Tuhan menjadi pengganti dari raja-raja dan pemimpin-pemimpin dan Nabi-nabi Bani Israil yang terdahulu dari padanya.

3. Tetapi ada pula ayat-ayat bahwa anak cucu atau keturunan yang dibelakang adalah sebagai Khalifah dari nenek-moyang yang dahulu (sebagai tersebut dalam Surat Yunus/10:14), demikian juga dalam surat-surat yang lain.
4. Tetapi dalam surat an-Naml/27:62. Ditegaskan bahwa seluruh manusia ini adalah Khalifah di muka bumi ini.⁸³

Sementara *khalifah* (pengganti atau penyambung), Hamka mengartikannya dengan dua pengertian. *Pertama*, manusia telah diangkat oleh Allah Swt., menjadi khalifah di muka bumi. *Kedua*, Umat Muhammad Saw., menjadi khalifah dari umat-umat terdahulu. Jadi bukan sebagai khalifah Allah, melainkan menggantikan tugas dari nenek moyang atau menyambung atas orang-orang yang telah lalu. Khalifah memiliki tugas yaitu meramaikan bumi mencurahkan akal budi untuk menciptakan, bekerja, mencari, menambah keilmuan dan membangun, berkebudayaan dan memajukan,

⁸² QS. Shad/38:26

⁸³ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz I, h. 166-167

mengatur urusan Negeri, Bangsa bahkan Benua. Di dalam perjuangan hidup di dunia, orang yang pintar hendaknya memimpin mereka yang tidak pintar, orang yang kuat menjadi pembela bagi orang yang lemah. Tapi yang mulia di sisi Allah adalah yang lebih tinggi takwanya kepada Allah.⁸⁴

2. Sumber Kekuasaan Politik

Perlu di sadari bahwa kekuasaan yang dipegang oleh manusia di muka bumi ini pada hakikatnya tidaklah mutlak dia yang memilikinya dan bukan dia yang menciptakan kekuasaan itu. Tetapi sebenarnya Allah yang memberikan kekuasaan itu kepada manusia yang Allah kehendaki, itu menunjukkan bahwa dari Allah lah kekuasaan itu berasal. Dimana kekuasaan dari segala bentuknya adalah milik Allah, yang telah menjadikan manusia sebagai pemimpin atau khalifah untuk menjalankan kekuasaan tersebut yang diikuti dengan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dalam nash.⁸⁵ Penafsiran ini muncul ketika Hamka menafsirkan ayat yang pertama dari surat al Mulk yang berbunyi “ *Maha Suci Allah, yang di tangan-Nyalah segala kerajaan. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu*”. Dalam ayat lain Allah Swt., QS. Ali Imran/3:26.

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang

⁸⁴ Ahmad Hakim dan M.Thalhah, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka*, h. 57

⁸⁵ Ahmad Hakim dan M.Thalhah, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka*, h. 54

Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Hamka menjelaskan *Asbabun Nudzul* tentang ayat ini bahwa ketika Nabi Muhammad yang berasal dari kaum Quraisy di angkat menjadi Nabi menimbulkan iri hati di kalangan Yahudi (Bani Israil). Karena selama ini Nabi dan Rasul pembawa Risalat di utus dari kalangan mereka. Adapun bangsa Quraisy (Arab di Hejaz) adalah bangsa yang biasa dan bukan dari kalangan bangsawan. Sementara di bagian Utara ada raja-raja dari kalangan Bani Mundzir yang dipandang sebagai kalangan bangsawan, dan mereka berada di bawah kekuasaan Persia dan Kerajaan Romawi. Tapi sekarang muncul kekuasaan baru dari tanah Arab. Yaitu Nabi Muhammad Saw., yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi Rasul. Walaupun hanya di utus menjadi Rasul tapi Rasulullah memperoleh kekuasaan, suatu pemerintahan yang megah dan berwibawa, menegakkan kebenaran dan mencegah kebatilan. Kerajaan Romawi dan Kerajaan Persia tidak mengakui kenyataan itu.⁸⁶

Rasulullah berjuang bukan berniat mencari kekuasaan, atau untuk menduduki jabatan tertinggi yaitu sebagai kepala Negara. Yang dituju Rasulullah ialah kebebasan beragama, tegaknya syiar Allah dan manusia terlepas dari kehidupan yang gelap-gulita penuh dengan kesyirikan kepada kehidupan yang terang-benderang penuh dengan cahaya Iman. Walaupun Rasulullah tidak berniat mencari kekuasaan, tapi kekuasaanpun tercapai. Dan pada akhirnya kekuasaan bukanlah sebuah tujuan melainkan menjadi alat untuk menegakkan agama. Bani Israil merasa bahwa dari

⁸⁶Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz I, h. 141

kalangan mereka saja Nabi di utus, dari kalangan yang lain tidak. Kalaupun ada mereka mengatakan itu Nabi Palsu. Raja Persia pernah memberikan perintah kepada bawahannya untuk menangkap Rasulullah, yang dilihatnya sebagai pengacau di Tanah Arab, dalam keadaan hidup atau mati.⁸⁷

Kemudian Hamka menjelaskan. Dalam keadaan yang demikian itu Tuhan menyuruh mengucapkan do'a: *Katakanlah: Ya Tuhan yang memiliki segala kekuasaan,*"(pangkal ayat 26). Seluruh kekuasaan dilangit dan di bumi, atau segala makhluk yang hidup atau yang mati, di laut dan di darat, gunung dan lembah, yang berada di alam semesta. *"Engkau Berikan kekuasaan kepada barangsiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari barangsiapa yang Engkau kehendaki"*. Sebesar apapun kekuasaan seseorang raja yang diberi oleh Allah, mudah saja baji-Nya mencabutnya. Sudah banyak raja-raja, sultan-sultan, yang dulu nenek-moyangnya berkuasa besar, sampai pada anak atau cucu; semuanya habis yang tinggal hanyalah gelar. *"Dan Engkau muliakan barangsiapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan barangsiapa yang Engkau kehendaki"*. Kemudian Allah bisa menganugerahkan kekuasaan walaupun kepada orang yang tidak berpangkat tinggi. Dan kehinaan bisa Allah jatuhkan pula walaupun kepada orang yang memiliki pangkat yang tinggi. *"Di tangan Engkau segala kebaikan."* Yaitu Engkaulah sumber telaga dari segala yang baik di alam ini, dipancarkan-Nya kepada sekalian makhlukNya, sehingga

⁸⁷Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz I, h. 141

semuanya mendapat menurut kadar bahagian masing-masing. “ *Sesungguhnya Engkau atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa.*” (ujung ayat 26).⁸⁸

Dari penafsiran Hamka diatas, dapat kita simpulkan bahwa Ayat ini menyatakan, Allah Ta’ala adalah pemilik sejati kekuasaan. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah jualah yang mencabut kekuasaan mereka yang Allah kehendaki. Allah bisa saja menimpakan kehinaan kepada orang yang memiliki kekuasaan tinggi, dan Allah bisa juga mengangkat orang yang hina menjadi seorang penguasa. Karena pada dasarnya Allah-lah yang memiliki kekuasaan itu, manusia hanya menjalankan kekuasaan sebagai amanah dari Allah Swt.

3. Janji Allah Kepada Orang-orang Yang Beriman

Adalah suatu kepastian, kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih Allah Swt., akan memberikan kemenangan kepada mereka dalam bentuk kekuasaan. Dengan kekuasaan itu kemudian Islam mengubah kehidupan manusia kepada tingkat moral yang tinggi, sosial, pendidikan, ekonomi, kebudayaan yang rendah menjadi manusia yang memiliki budaya dan peradaban yang tinggi, kemudian maju dengan berdasarkan kepada: Nilai-nilai, hukum, norma, moral yang disokong dengan keimanan, bersikap terbuka dan demokratis, menghormati keberagaman, dan bekerjasama menjaga keutuhan Negara.⁸⁹

Hal ini sebagaimana tertuang dalam al Qur’an. Allah Swt berfirman dalam QS. An Nuur/24:55.

⁸⁸Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz I, h. 142

⁸⁹Saidurrahman, *Tafsir Ayat-ayat Politik*, (Bandung: Citapustaka Media.2013), h. 32

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن
 بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.⁹⁰

Hamka menjelaskan, bahwa Ayat 55 ini merupakan inti tujuan perjuangan hidup. Dan inilah janji dan pengharapan yang telah diberikan oleh Tuhan bagi setiap Mu'min dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keyakinan di permukaan bumi ini. Hamka menyatakan :

Bahwa pokok pendirian mesti dipegang teguh dan sekali-kali jangan dilepaskan, baik keduanya atau salah satu di antara keduanya. *Pertama* ialah iman atau kepercayaan. *Kedua* amal saleh, perbuatan baik, bukti dan bakti. Kalau keduanya telah berpadu satu, amal salih timbul dari iman dan iman menimbulkan amal, terdapatlah kekuatan pribadi, baik orang-seorang ataupun pada masyarakat Mu'min itu.⁹¹

Kepada setiap orang yang memegang teguh pendirian itu atau masyarakat seperti inilah Allah menjanjikan bahwa mereka akan diberikan warisan kekuasaan di atas bumi ini. Kendali bumi ini akan diserahkan ke tangan mereka, sebagaimana dahulu

⁹⁰ QS. An Nuur/24:55

⁹¹ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz XVIII, h. 217

pun warisan yang demikian telah pernah pula diberikan kepada ummat yang terdahulu dari mereka. Oleh sebab itu Hamka berkesimpulan dari ayat diatas:

Cita-cita menjadi Khalifah Allah di atas bumi ini, adalah memegang tampuk pemerintahan di atasnya, pasti berhasil, asal kamu masih tetap beriman dan beramal shalih. Yang cita-cita itu pasti tercapai, yaitu agamamu tegak tidak ada gangguan dan keamanan timbul, segala kekacauan hilang. Sebab semuanya itu didapat dengan teguh percaya kepada Tuhan. Tetapi siapa yang menyeleweng, terhitunglah ia fasik dan durhaka.⁹²

Disisi lain, Hamka juga memberikan pandangan bahwa pemimpin dan kepemimpinan dijanjikan oleh Allah dijelaskan dengan terang bahwa perkara yang membentuk pemimpin itu ada tiga yaitu Allah, rasul dan orang yang beriman, mereka adalah merupakan saluran yang akan menyalurkan kehendak Allah dan rasul dalam mengemudi umat serta mencapai ridho Allah.⁹³ Kemudian Hamka menjelaskan faktor yang mendorong seseorang untuk menjadi pemimpin. Sebagaimana di kutip oleh Zulkifli Mohd Yusoff dan Abdul Hafiz Abdullah:

“Kerana dia diakui lebih kuat, lebih pandai dan lebih dapat dikemukakan, dia bersedia naik yang lain bersedia turun, dia bersedia mengatur dan yang lain bersedia diatur. Sebabnya bermacam-macam; ada kerana keturunan, seumpama anak seorang ulama menjadi ulama pula kerana lingkungan dan pergaulan dan kebiasaan di dalam rumah ayahnya yang dilihatnya sejak kecil”.⁹⁴

Alasan lain yang menyebabkan seseorang untuk menjadi pemimpin, diantaranya adalah agama, faham yang dipegang, perebutan yang dapat mempengaruhi.

⁹² Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz XVIII, h. 223

⁹³ HAMKA, “Dari Hati Ke Hati: Konsepsi al-Qurān tentang Pemimpin”, *Panji Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam 1971, No. 76, 1 April 1971, h.3-4. lihat Dalam: <https://www.librarybus.com/view?t=kepemimpinan+menurut+hamka%3A+sa++UM+Repository&u=http%3A%2F%2Frepository.um.edu.my%2F94773%2F1%2F02Kepimpinan%2520Menuru%2520Pandangan%2520HAMKA%2520Abdul%2520Hafiz.pdf>. Diakses pada tanggal 21/02/2019 jam 8:56

⁹⁴ Zulkifli Mohd Yusoff dan Abdul Hafiz Abdullah, “Pemimpin Menurut Pandangan Hamka: Satu Tinjauan Dalam Tafsir Al-Azhar (Leadership According to HAMKA: A Review on Tafsir Al-Azhar”, (Jurnal Al-Tamaddun Bil. 8 (1). 2013), h. 19

Hamka menegaskan sebagaimana di kutip oleh Zulkifli Mohd Yusoff dan Abdul Hafiz

Abdullah:

“Agama yang dipeluk atau kitab-kitab yang dibaca atau suatu fahaman yang dipegang teguh, semuanya pun menentukan corak pemimpin, bahkan perlumbaan perebutan pengaruh dan kuasa dengan pemimpin yang lain yang sama-sama hidup menjadi saringan juga buat menentukan kelemahan dan kekuatan...”⁹⁵

4. Pemimpin Harus Adil

Al Qur'an sebagai pedoman umat Muslim mengajarkan beberapa hal yang penting dalam kehidupan setiap muslim, salah satu konsep yang dijelaskan dalam al Qur'an adalah (العدل) artinya keadilan. Kata *al-'adl* (العدل) secara bahasa berarti lurus, jujur dan tidak khianat. Pada dasarnya *al-'adl* adalah ditengah-tengah antara dua hal, yakni antara *ifrath* (melampaui batas) dan *tafrith* (kesembronoan). Barangsiapa yang mampu menjauhkan diri dari *ifrath* dan *tafrith*, maka ia telah berbuat adil.⁹⁶ Untuk itulah, al Qur'an memberikan perintah keras supaya keadilan ditegakkan di segala bidang kehidupan dan pergaulan, disertai dorongan kuat supaya setiap manusia menjadi penegak dan pembela keadilan. Termasuk dalam bidang kekuasaan. Allah berfirman dalam al Qur'an, QS. Shad/38: 26.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

⁹⁵ Zulkifli Mohd Yusoff dan Abdul Hafiz Abdullah, “Pemimpin Menurut Pandangan Hamka: Satu Tinjauan Dalam Tafsir Al-Azhar (Leadership According to HAMKA: A Review on Tafsir Al-Azhar”, (Jurnal Al-Tamaddun Bil. 8 (1). 2013), h. 19

⁹⁶ Saidurrahman, *Tafsir Ayat-ayat Politik*, h. 47-48

*Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.*⁹⁷

“ Hai Daud! Sesungguhnya Kami telah menjadikan engkau khalifah di muka bumi.” (pangkal ayat 26). Tentang arti dan makna khalifah sudah sudah dijelaskan di awal. Ketika Allah menyatakan kepada malaikat-malaikat bahwa Dia hendak mengadakan khalifah di muka bumi. Makna yang dekat dengan Khalifah ialah pengganti atau pelaksana.

Hamka menjelaskan, bahwa Adam sebagai Bapak pertama dari manusia dapat dianggap sebagai Khalifah Allah di muka bumi. Adapun Daud sekarang ini, bisa Dia diartikan menyambut tugas Adam jadi Khalifah dari Allah. Melihat kepada kedudukannya sebagai raja dari bani Israil, kedudukannya sebagai Khalifah itu sudah bukan semata-mata menjadi Rasul dan Nabi saja lagi, bahkan juga sebagai pemegang kekuasaan. Hamka menerangkan supaya jabatan Khalifah itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya. Maka Allah memberi beberapa pesan . *Pertama: “Maka hukumlah diantara manusia dengan benar”*. Hukum yang benar ialah hukum yang adil. Di antara kebenaran dengan keadilan adalah satu hal yang memiliki nama berbeda tapi saling berkesinambungan. Yang *benar* itu juga dan yang *adil* itu juga kalau sudah benar pastilah dia adil. Kalau sudah *adil* pastilah dia *benar*. “Dan janganlah engkau perturutkan hawa”. Hamka mengartikan bahwa Hawa ialah kehendak hati sendiri yang terpengaruh oleh rasa marah atau kasihan, hiba atau sedih, dendam atau benci. Dalam

⁹⁷ QS. Shad/38: 26

bahasa Indonesia hawa itu disebut dengan *emosi* atau *sentiment*. Lalu dilanjutkan dengan bahaya yang akan mengancam jika seorang penguasa menjatuhkan suatu hukum dipengaruhi oleh hawanya: “*Niscaya dia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah*”. Hamka menjelaskan, kalau seorang penguasa, sultan, khalifah atau presiden atau yang lainnya tidak lagi menghukum dengan *benar* dan *adil*, malahan sudah *hawa* yang menjadi hakim, hilanglah harapan orang banyak untuk mendapat perlindungan hukum dari yang berkuasa dan hilang keamanan jiwa dalam Negara. “*Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, untuk mereka azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*” (ujung ayat 26). Sesungguhnya kekuasaan itu suatu ujian yang berat. Kekuasaan bisa saja menyebabkan orang lupa dari mana dia menerima kekuasaan itu, lalu dia berbuat sewenang-wenang berkehendak hati. Sebab itu disalahgunakannya kekuasaan.⁹⁸

Dalam pandangan Hamka bahwa keadilan adalah asal mula dari kekuasaan, Keadilan yang tidak berat berat sebelah dan keputusannya, tidak dipengaruhi oleh sentiment perasaan benci dan perasaan sayang. Keadilan yang undang-undangnya tidak berubah-ubah disebabkan kekeluargaan dan kefamilian. Sebagaimana sabda Rasul “*Demi Allah! Sekiranya Fatimah anakku sendiri yang mencuri, tetap aku akan potong tangannya*” Keadilan yang tidak dipengaruhi oleh sesama anggota partai atau pertentangan ideology. Keadilan yang pernah dirasakan oleh kaum muslimin ketika pemerintahan masa Rasulullah yang dilandaskan kepada al Qur'an dan Hadis. Keadilan

⁹⁸ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz XXIII, h. 212

yang harus dipertahankan karena dialah sendi kekukuhan Negara, walaupun terhadap teman karib dan kepada musuh yang dibenci sekalipun⁹⁹. Firman Allah Swt.,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

“...Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa...”¹⁰⁰

Dalam hal untuk memilih seorang pemimpin, Hamka menegaskan bahwa al Qur'an telah memberikan dua pokok dasar dalam memilih pemimpin atau yang akan memegang tampuk kekuasaan. *Pertama*, Ilmu, dan *Kedua*, Tubuh. Terutama ilmu yang berkaitan dengan tugas yang akan dihadapinya, sehingga tidak membuat dia ragu dalam menjalankan roda pemerintahannya. Yang penting sekali ialah Ilmu dalam tata cara menggunakan tenaga untuk pemerintahannya. Pemimpin tertinggi tidak perlu mengetahui segala macam cabang ilmu, tetapi wajib mengetahui ilmu tentang apa yang akan ditugaskan untuk menghadapi suatu pekerjaan, itulah ilmu tentang kepemimpinan. Sedangkan yang dimaksud dengan tubuh ialah kesehatan, bentuk tampan, yang menimbulkan simpati. Oleh sebab itu, ulama-ulama banyak berpendapat bahwa seseorang yang badannya cacat (*invalid*) janganlah dijadikan seorang kepala Negara atau raja. Seperti buta, tuli, dan mengalami gangguan jiwa karena orang seperti itu akan sulit menjalankan roda pemerintahan.¹⁰¹ Sementara seorang kepala Negara memiliki tugas yang berat sebagaimana yang dikemukakan Hamka tentang status wajibnya

⁹⁹ Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, h. 49

¹⁰⁰ QS. al Maaidah/5:8

¹⁰¹ Ahmad Hakim dan M.Thalhah, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka*, h. 59-60

mendirikan Negara dan bertujuan untuk melindungi jiwa umat, membela darahnya, menjaga keamanannya, menghukum yang salah, dan mengatur masyarakatnya.¹⁰²

Hamka juga menganjurkan seorang pemimpin itu setidaknya harus memiliki 4 sifat yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang datang menghampiri ketika sedang memimpin.

1. Amanah

Arti amanah dalam kepemimpinan lebih tinggi daripada arti amanah pada pemahaman orang biasa. Oleh sebab itu, para pemimpin janganlah membelanjakan harta rakyat untuk kepentingan diri sendiri dan golongan, pemimpin juga dilarang mengkhianati kawan-kawannya. Mereka wajib jujur, ikhlas, tidak terlalu banyak menabur janji yang tidak dapat dipenuhi serta mereka hendaklah berusaha bersungguh-sungguh.

2. Berani

Pemimpin yang berani adalah yang sanggup menghadapi segala kesulitan atau bahaya dengan tidak kehilangan akal. Tanda berani adalah sikap tenang dan tidak gugup, sehebat apapun pihak yang dihadapi. Dalam memilih suatu pendirian, kita tidak boleh takut akan dibenci orang lain. Sebab hal itu adalah berdasarkan pandangan dan pembelajaran kita.¹⁰³ Para pemimpin haruslah mempunyai sifat berani berterus terang untuk meluruskan kembali pendapat umum yang salah dan

¹⁰² Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, h. 71

¹⁰³ Hamka, *Pribadi Hebat*, (Depok: Gema Insani.2017), h. 28-30

menyeleweng, walaupun mereka akan marah atau murka terhadap tindakannya tersebut.

3. Bijaksana

Hikmah kebijaksanaan adalah tiang yang kukuh bagi pertumbuhan pribadi. Timbulnya kebijaksanaan adalah karena ilmu, ketetapan hati dan karena meletakkan sesuatu pada tempatnya, serta menilik sesuatu pada nilainya. Cara-cara untuk bijaksana adalah bersiap dan tidak terburu-buru, Ilmu dan pengalaman, cerdik cendikia, teguh dan tetap hati.¹⁰⁴ Para pemimpin wajib mempunyai sifat bijaksana, kerana sebuah negara banyak melakukan perjanjian dengan negara-negara luar. Kebijaksanaan pemimpin diukur bukan hanya dalam menjalankan tugas-tugas dalam negara, malah ia merangkum hal-hal luar negara. Pemimpin yang bijaksana disebabkan banyak pengalaman adalah amat penting dan pemimpin yang bijaksana dapat mengukur kekuatannya.

4. Timbang rasa

Timbang rasa (Empati) muncul karena hati yang bersinar. Sinar itu membayang di mata sehingga raut muka pun menjadi jernih. Sir Walter Scott berkata, “Timbang rasa laksana rantai perak atau benang sutra yang menghubungkan hati dengan hati, akal dengan akal dan tubuh dengan jiwa.”¹⁰⁵ Para pemimpin hendaklah mempunyai sikap timbang rasa atau setia kawan, yaitu keteguhan hubungan pemimpin dengan rakyat terutamanya dengan rekan-rekan mereka yang terdekat. Para pemimpin

¹⁰⁴ Hamka, *Pribadi Hebat*, h. 36-37

¹⁰⁵ Hamka, *Pribadi Hebat*, h. 22

sejati harus merasai apa yang dirasai oleh rakyat-rakyatnya, merasakan apa yang dideritai oleh rakyat jelata dan hati mereka sentiasa terbuka menerima rakyat.

C. Urgensi Pemikiran Politik Hamka Terhadap Umat Islam Indonesia

Upaya Hamka dalam menggagas ide-ide politik (Islam) tidak hanya dilakukan melalui mimbar atau karya-karya tulisnya. Lebih lanjut lagi ia mengapresiasi ide-idenya itu secara nyata dalam kegiatan politiknya. Fenomena ini terlihat dari keterlibatannya sebagai seorang politikus dan keterlibatannya sebagai anggota konstituante¹⁰⁶ sekaligus pengurus di berbagai organisasi, seperti Muhammadiyah, Sarekat Islam, Masyumi dan lain-lain.

Pemikiran politik Hamka yang banyak di jumpai di dalam karya-karyanya dan dalam kegiatan politiknya tentunya masih akan hangat untuk dikaji dan diperbincangkan pada masa sekarang ini, walaupun pemikirannya tidak lepas dari situasi dan kondisi sosial-politik pada masa itu tidak sama dengan kondisi sosial-politik pada masa sekarang ini. Salah satu pemikirannya yang tertuang dalam karyanya adalah mengenai kekuasaan politik, hal itu dapat dilihat dari penafsirannya atas berbagai ayat-ayat yang memiliki nilai-nilai kekuasaan politik atau ayat-ayat yang membicarakan secara umum tentang pemimpin dan kepemimpinan. Hamka memberikan penjelasan mengenai pemimpin dan memberikan prinsip-prinsip dan kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi penguasa politik atau pemimpin.

¹⁰⁶Konsituante adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas sekali pakai, yaitu untuk membentuk Undang-undang dasar yang daya lakunya definitif. Lihat Katimin, *Politik Islam Indonesia: Membuka Tabir Perjuangan Ideologis dalam Sejarah Politik Nasional*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), h. 102

Mengenai pemimpin, sebagaimana di jelaskan di atas bahwa perkara yang membentuk pimpinan ialah tiga yaitu Allah, rasul dan orang yang beriman. Pemimpin dalam Islam dimaksudkan untuk menjaga agama dan mempraktekkan syari'ah agama, memberikan kesejahteraan, keamanan dan keadilan bagi seluruh rakyat yang dia pimpin tanpa membedakan suku, agama dan ras dari setiap rakyatnya. Karena politik yang adil itu merupakan perwujudan dari keadilan Allah dan Rasul-Nya.¹⁰⁷

Pemikiran politik Hamka yang didasarkan pada al Qur'an dan Sunnah ini relevan dengan pemikiran kenegaraan Indonesia. Didasarkan karena kaum Muslimin jumlahnya mayoritas di Negeri ini kemudian bahwa dasar Negara Indonesia adalah Pancasila dan UUD 45 yang di dalamnya mengandung unsure teologis.

Dengan mempelajari dan mempraktekkan pemikiran politik Hamka yang teologis ini akan menghindarkan Umat Islam dari pemikiran politik Barat yang sekuler dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan sebagaimana yang di kemukakan Machiavelli. Kemudian Machiavelli juga mengatakan kekuasaan harus bebas dari nilai-nilai etis, cultural dan religius¹⁰⁸. Pemikiran politik Barat itu terkenal dengan pemisahan antara Agama dan Negara, dan meninggalkan campur tangan agama dalam urusan politik kenegaraan.

Pemikiran yang terkenal sekuler itu pernah masuk kedunia Islam pada zaman Mustafa kemal Atarturk. Turki pada saat itu adalah suatu Negeri yang masyarakatnya

¹⁰⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Buku Pintar Memutuskan Perkara: Dari Rumah Tangga, Peradilan Sampai Negara*, Tjm. Muhammad Muchson Anasy, h. 29

¹⁰⁸ J.H. Rapar, *Filsafat Politik : Plato, Aristoteles, Augustinus, Mazhiavelli*, (Jakarta: PT RajaGrafindo.2001), h. 429

mayoritas umat Islam dan mengalami kemunduran. Disaat itu lah Kemal beranggapan bahwa untuk membangkitkan kembali kejayaan Turki adalah dengan cara mengadopsi politik barat yang sekuler. Turki memang maju dan kembali berjaya, namun umat Islam Turki sangat tidak senang karena seluruh yang berhubungan dengan agama Islam ikut di pisahkan oleh Kemal, bukannya hanya politik yang dipisahkan dari agama namun segala sendi-sendi kehidupan pun ikut di pisahkan. Sehingga agama hanya persoalan individu semata, mesjid dijadikan Museum, Adzan di tukar kedalam bahasa Turki, bahkan al Qur'an pun di terjemahkan ke dalam bahasa Turki dengan alasan Nasionalisme.

Kalaupun pemikiran yang demikian masuk dan berkembang di Indonesia maka tidak akan mustahil Indonesia pun akan menjadi Negara yang sekuler meskipun dasar Negara Indonesia adalah Pancasila dan UUD 45 yang memuat nilai-nilai teologis atau nilai-nilai ketuhanan.

Selanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berke-Tuhan-nan Yang Maha Esa, sehingga kebijakan dan peraturan yang diberlakukan adalah berdasarkan dari ruh sila pertama Pancasila, baik secara formal maupun secara substansial. Dalam hal ini, Hamka berpendapat sama pentingnya adanya suatu hubungan antara Negara dengan Agama. Keduanya berpengaruh dan saling mendukung, sehingga tercipta suatu hubungan yang lancar dan harmonis. Dengan begitu ajaran Islam akan terlaksana dan keadilan akan di dapatkan oleh rakyat.

Dalam hubungan antara agama dan Negara yang saling memberi pengaruh dan saling mendukung tentunya segala system pemerintahan dalam negeri itu tidak akan

terlepas dari nilai-nilai agama. Melihat system pemerintahan Indonesia yang memiliki susunan lembaga Negara dan di pegang oleh majelis yang dipilih oleh rakyat secara demokratis. Muncullah suatu persamaan antara pemikiran Hamka dengan system pemerintahan yang dianut oleh Indonesia. Pemikiran politik Hamka, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Hakim dan M.Thalhah¹⁰⁹. Beberapa pemikiran politik Hamka tersebut adalah :

1. Syura

Hamka menjelaskan bahwa *Syura* yang dijelaskan di dalam al Qur'an dengan system demokrasi Indonesia adalah merupakan pokok pembangunan Negara dan dasar politik dari suatu pemerintahan. Dalam hal pelaksanaannya, Hamka tidak memberikan batasan tetapi Hamka mengarisbawahi pada keadaan ruang dan waktu yang senantiasa mempengaruhi segala sesuatu yang baru.

Karena tidak adanya mekanisme yang baku tentang pelaksanaan musyawarah dalam al Qur'an maupun Hadits, karena kalau sekiranya al Qur'an memberikan mekanisme pelaksanaan yang baku padahal kondisi sosial-politik yang selalu berubah-ubah seiring berubah dan berkembangnya suatu zaman tentulah umat muslim tidak akan mengalami kemajuan. Maka dalam hal ini, sangat mungkin untuk dilakukan *ijtihad* bagaimana melaksanakan *Syura* / musyawarah dan mengambil keputusan akan tetapi tidak keluar dari syari'at.

Pada zaman Rasulullah sebenarnya pelaksanaan musyawarah ini sudah dilaksanakan oleh Nabi ketika memimpin Negara Madinah. Salah satu yang menjadi

¹⁰⁹ Ahmad Hakim dan M.Thalhah, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka*, h. 123-133

buktinya adalah lahirnya piagam Madinah, piagam itu tidaklah semata-mata Rasul yang membuat sendiri namun itu adalah hasil kesepakatan/musyawarah dari kaum muslimin Anshar maupun kaum muslimin Muhajirin dengan kaum Yahudi atau kaum yang lain yang sudah lama mendiami Madinah.

2. Negara dan Kepala Negara

Praktik penyelenggaraan Negara di Indonesia yang dijalankan oleh Presiden dan di bantu oleh seorang wakil dan juga beberapa menteri. Seorang presiden tidak hanya menjabat sebagai kepala pemerintahan atau kepala eksekutif saja tetapi juga sebagai kepala Negara atau yang disebut dengan system Presidensial. Maka dari itu UUD 45 memberikan kedudukan sebagai pemimpin nasional kepada presiden. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden sebagai kepala Negara yang memiliki kekuasaan yang luas haruslah benar-benar faham bagaimana tata cara menjalankan pemerintahan yang luas itu.

Dalam hal ini, Hamka memberikan kriteria bahwa calon kepala Negara itu harus memiliki *Ilmu*. Terutama tentang ilmu pemerintahan dan ilmu menjalankan pemerintahan. Sehingga disini muncul seperti *saran* bagi pemikiran kenegaran Indonesia untuk menjadikan kepala Negara itu harus berilmu.

3. Tentang Agama dan Negara

Indonesia adalah Negara yang beragam suku, ras, dan agama. Indonesia dalam dasar Negeranya menjelaskan bahwa setiap warga Negara nya harus memiliki agama atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal in, Hamka berpendapat bahwa agama dan Negara harus memiliki hubungan yang erat, saling mempengaruhi dan

saling membutuhkan. Sehingga akan tercipta suasana yang adil dan damai dalam kehidupan rakyat Indonesia.

4. Hubungan Internasional

Di zaman modern ini, sebuah Negara sepertinya tidak bisa lepas dari pengaruh Negara lain karena antara Negara yang satu dengan Negara yang lain sama-sama memiliki kepentingan diantara keduanya dalam membangun Negara masing-masing. Hamka menjelaskan bahwa kita (Negara) tidak terhalang untuk berhubungan dan berdamai dengan mereka (Negara lain) asalkan kita dalam kondisi yang kuat, artinya kita tidak akan terpengaruh dan terjemurus kedalam kemungkinan niat jahat dari Negara lain. Dengan menjalin hubungan Internasional akan memberikan dampak yang positif terhadap Indonesia jika dalam hubungan itu terdapat saling percaya dan tidak ada niat pengkhianatan diantara keduanya.

Melihat dari seluruh pemikiran Hamka tersebut. Nampaknya akan sangat berguna dan sangat relevan untuk kemajuan bangsa Indonesia kedepannya. Indonesia harus tetap memiliki pemimpin-pemimpin yang cerdas dan berkeadilan sehingga mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan mampu menjaga toleransi diantara agama-agama dan suku-suku yang ada di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ayat-ayat yang di bahas sebagai landasan kekuasaan politik dalam al Qur'an meliputi: QS. Al Baqarah/2:30, Ali Imran/3:26, An Nur/24:55, QS.Shad/38:26.

Penafsiran Hamka tentang ayat-ayat kekuasaan politik dalam al Qur'an di atas adalah bahwasanya Allah Swt. menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai Khalifah/pemimpin. Kekuasaan politik yang dimiliki seseorang di muka bumi ini tidak mutlak dia yang memilikinya, melainkan hanya titipan dari Allah Swt. karena Allah lah sumber dan pemilik kekuasaan itu. Janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal Shalih ialah bahwa Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka seperti yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Ini perlu di catat bahwa siapa yang ingin berkuasa maka hendaklah memperkuat Iman dan Amal Shalih. Seorang pemimpin hendaklah berlaku Adil dan Amanah terhadap seluruh rakyatnya.

Urgensi pemikiran politik Hamka terhadap umat Islam Indonesia adalah bahwa pemikiran Hamka dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kaum muslimin Indonesia yang ingin memasuki dunia politik. Karena pemikirannya yang selalu di dasari dengan al Qur'an dan Hadits sehingga dapat menyaring pemikiran politik Barat yang berusaha menjauhkan permasalahan politik dengan agama atau sekuler.

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis. Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemuda/I penerus bangsa. Seharusnya kita banyak membaca buku tokoh-tokoh pahlawan Nasional dan buku-buku pemikir Muslim. Karena dengan begitu kita akan lebih mengenal dan dapat mengambil ilmu dari buku-buku mereka yang sangat berguna dan bermanfaat.
2. Kepada para elit politik Muslim Indonesia. Hendaknya memahami dan mengaplikasikan pemikiran Hamka ini agar tidak menjadi politisi yang jauh dari agama dan mementingkan kepentingan kelompok.
3. Kepada para pemimpin dan para wakil rakyat di Negeri ini. Hendaklah mereka menyadari bahwa kekuasaan yang mereka miliki pada saat ini bukanlah mutlak kekuasaan mereka. Dengan begitu diharapkan mereka dapat menjalankan kekuasaan mereka dengan adil dan amanah demi kepentingan rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*

Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Tjm. Khalifaturrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press. 2015

Ahmad Hakim dan M.Thalhah, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka*, Yogyakarta: UII Press. 2005

Ahmad Rofi' Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, Bandung: Mizan. 2015

A-Jauziyah, Ibnu Qayum, *Buku Pintar, Memutuskan Perkara*, Tjm. Muhammad Muchshon Anasy, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1998

A.Al-Buraey, Muhammad, *Islam: Landasasn Alternatif Administrasi Pembangunan*, Tjm. Achmad Nashir Budiman, Jakarta: Rajawali. 1986

Aly, Sirojuddin, *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan*, Depok: Rajagrafindo Persada. 2018

Ali, Eko Maulana, *Kepemimpinana Integratif Dalam Konteks Good Governance*, PT Multicerdas Publishing. 2013

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008

Dipoyudo, Kirdi, *Keadilan Sosial*, Jakarta: Rajawali. 1985

Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana. 2015

Hamka, *Sejarah Umat Islam: Pra-kenabian hingga Islam di Nusantara*, Jakarta: Gema Insani. 2016

Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid I. Jakarta: Panjimas. 1988

Hamka, *Pribadi Hebat*, Depok: Gema Insani. 2017

Hamka, *Dari Hati ke Hati*, Jakarta: Gema Insani. 2017

Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Depok: Gema Insani. 2015

Hamka, Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Jakarta: Mizan Publika. 2018

- Haidar Musyafa, *Buya Hamka: Sebuah Novel Auto Biografi*, Tangerang Selatan: Imania. 2018
- Iqbal, Muhammad dan Nasution, Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana. 2013
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Politik Islam*, Jakarta: Pernada Media Group. 2018
- J.H. Rapar, *Filsafat Politik : Plato, Aristoteles, Augustinus, Mazhiavelli*, Jakarta: PT RajaGrafindo. 2001
- Katimin, *Politik Islam Indonesia: Membuka Tabir Perjuangan Ideologis dalam Sejarah Politik Nasional*, Medan: Perdana Publishing. 2018
- Katimin, *Politik Islam : Studi Tentang Azaz Pemikiran, dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam*, Medan:Perdana Publishing. 2017
- Katimin, *et.al. Hadis-Hadis Politik*, Medan: Perdana Publishing. 2018
- Katimin, *Politik Masyarakat Pluralis: Menuju Tatanan Masyarakat Berkeadilan dan Berperadaban*,Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2010
- Khaldun, Ibnu, *Mukaddimah*, Tjm.Masturi Ilham, Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2016
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: RajaGrapindo Persada. 2014
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari pandangan Al qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994
- Saidurrahman, *Tafsir Ayat-ayat Politik*, Bandung: Citapustaka Media. 2013
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam : Siyasah Dusturiyah*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2012
- Syahrul, Achmad, *Penafsiran Hamka Tentang Surya Dalan Tafsir Al-Azhar*,Skripsi: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009
- Sirayudin, Ahmad, *“Konsep Etika Sosial Hamka : Dalam era Kekinian*,Skripsi: Jurusan Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015

- Taimiah, Ibnu, *Berpolitik Dalam Bingkai Syari'at*, Tjm. Abdul Hafs Al-Faruq, Sukoharjo:Al Qowam. 2018
- Wibowo, *Kepemimpinan: Pemahaman Dasar, Pandangan Konvensional, Gagasan Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo. 2016
- HAMKA, "Dari Hati Ke Hati: Konsepsi al-Qurān tentang Pemimpin", *Panji Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam 1971, No. 76, 1 April 1971, h.3-4. Dalam: <https://www.librarybus.com/view?t=kepimpinan+menurut+hamka%3A+sa++UM+Repository&u=http%3A%2F%2Frepository.um.edu.my%2F94773%2F1%2F02Kepimpinan%2520Menuru%2520Pandangan%2520HAMKA%2520Abdul%2520Hafiz.pdf>
- Yusoff, Zulkifli Mohd dan Abdullah, Abdul Hafiz, "*Pemimpin Menurut Pandangan Hamka: Satu Tinjauan Dalam Tafsir Al-Azhar (Leadership According to HAMKA: A Review on Tafsir Al-Azhar*", *Jurnal Al-Tamaddun Bil.* 8 .1. 2013
- Azra, Azyumardi, "Perjuangan Politik dan Pendidikan Buya Hamka" diakses dari <https://www.panjimas.com/inspirasi/tokoh/2018/02/16/membedah-perjuangan-dan-sikap-politik-buya-hamka/>
- Kusnadi, "*Nuansa-Nuansa Sastra Dalam Tafsir Hamka*", wardah: no. Xxix/ th. Xvi/ juni 2015
- Jambak, Fabian Fadhly, *Filsafat Sejarah Hamka: Refleksi Islam Dalam Perjalanan Sejarah*, *Jurnal Theologia*, Vol 28 No 2 . 2017
- Dewi Murni, *Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis*, *Jurnal Syahadah* Vol. III, No. 2, Oktober 2015